

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PENGEMBANGAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN
ALAUDDIN ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN
MENUJU UNIVERSITAS**



Oleh:

AHKAM JAYADI, S.H, MH.

DIBIYAI OLEH:

DIKS IAIN ALAUDDIN TAHUN 2003

**PUSAT PENELITIAN IAIN ALAUDDIN
MAKASSAR**

2004

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PENGEMBANGAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN
ALAUDDIN ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN
MENUJU UNIVERSITAS**



Oleh:

AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

DIBIAYAI OLEH:

DIKS IAIN ALAUDDIN TAHUN 2003

**PUSAT PENELITIAN IAIN ALAUDDIN
MAKASSAR**

2004

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
PUSAT PENELITIAN

JL. Sultan Alauddin No. 63 Tlp. 864931, 864 928 Pesawat 209

KATA SAMBUTAN

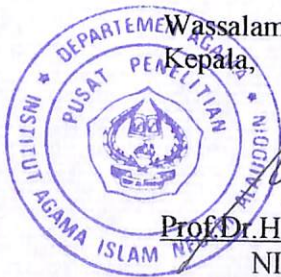
Alhamdulillah, syukur dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah swt, oleh karena dengan Hidayat dan Taufiq-Nya sehingga penelitian dengan judul: **Pengembangan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin antara Harapan dan Kenyataan Menuju Universitas**, ini dapat terselesaikan dengan baik.

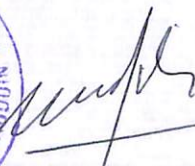
IAIN Alauddin melalui Pusat Penelitian selalu berupaya agar para dosen senantiasa menaruh minat dalam melaksanakan penelitian. Sebab, penelitian sebagai dharma ke-2 dari Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu terus digalakkan untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian, ilmu pengetahuan akan mengalami stagnasi sehingga tidak mampu menjawab tantangan kemajuan saman dan kebutuhan pembangunan bangsa.

Kami mengharapakan agar penelitian ini dapat menambah khazanah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara peneliti atas jerih payahnya melaksanakan penelitian. Semoga Allah swt, memberikan pahala yang setimpal.

Makassar, 1 Desember 2003

Wassalam,
Kepala,




Prof. Dr. H.M. Radhi Al Hafid, M.A.
NIP.150169620

LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN
TAHUN 2003

1. a. Judul Penelitian : **Pengembangan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin**
Antara Harapan dan Kenyataan Menuju Universitas
- b. Macam Penelitian : Terapan
2. Ketua Peneliti/Peneliti
- a. Nama lengkap dan gelar : **Ahkam Jayadi, S.H, MH.**
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Gol/NIP : Pembina Tk. I (IV-b) 150 231 530.
- d. Jabatan Sekarang : Lektor Kepala
- e. Fakultas / Jurusan : Syari'ah (Peradilan Agama).
- f. Bid. Ilmu yg diteliti : Ilmu Hukum
3. Jumlah Peneliti : 1 (satu) orang (Mandiri)
4. Lokasi Penelitian : Makassar
5. Biaya penelitian merupakan kerjasama kelembagaan, sebutkan
- a. Nama Instansi : -
- b. Alamat : -
6. Jangka waktu penelitian : 6 (enam) bulan.
7. Biaya : Rp. 1.500.000,- (Saru Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

MENGETAHUI
KEPALA PUSAT
PENELITIAN IAIN ALAUDDIN



Prof. Dr. H.M. Radhi Al Hafid, M.A

NIP. 150169620

Makassar, 5 Desember 2003
PENELITI,

Ahkam Jayadi, S.H, M.H.

NIP. 150 231 530

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
PUSAT PENELITIAN

JL. Sultan Alauddin No. 63 Tlp. 864931, 864 928 Pesawat 209

SURAT KETERANGAN

No. PL/TL.01/23 /2003

Kepala Pusat Penelitian IAIN Alauddin Makassar menerangkan bahwa:

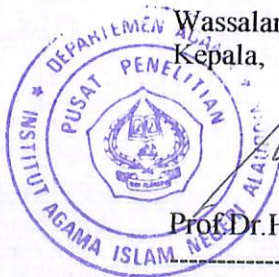
N a m a	: AHKAM JAYADI,S.H,MH.
N I P	: 150 231 530
Pangkat/Golongan	: Pembina Tk. I (IV-b).
Unit Kerja	: Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Makassar
Judul Penelitian	: Pengembangan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Antara Harapan dan Kenyataan Menuju Universitas

Yang bersangkutan telah menyelesaikan Penelitian tahun 2003 dan telah diseminarkan pada seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian IAIN Alauddin Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 1 Desember 2003

Wassalam,
Kepala,



Prof.Dr.H.M.Radhi Al Hafid,M.A.

NIP. 150169620

ABSTRAK

AHKAM JAYADI, *Pengembangan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Antara Harapan dan Kenyataan Menuju Universitas.*

Masalah Penelitian ini adalah: Apakah yang dipelajari dan diajarkan di fakultas Syari'ah serta Bagaimana peluang dan tantangan fakultas Syari'ah dalam menghadapi perubahan IAIN Alauddin menuju Universitas. Penelitian ini dikategorikan ke dalam *tipe penelitian deskriptif*. Untuk itu data penelitian yang dihimpun adalah *data kualitatif dan dilengkapi dengan data kuantitatif*. Data tersebut analisis dengan metode kualitatif dan deskriptif.

Hasil penelitian menemukan bahwa, kita mau atau tidak, kita setuju atau tidak dengan terpaksa kita harus bersiap dan mempersiapkan IAIN secara umum dan fakultas Syari'ah secara khusus dalam menghadapi perubahan menjadi universitas. Hal tersebut menuntut adanya suatu perencanaan yang terarah dan upaya konkrit yang lebih komprehensif dan berkesinambungan untuk memperbaiki struktur dan meningkatkan kultur. Dari segi struktur patut dilakukan suatu kajian ulang hingga bisa menawarkan organisasi yang lebih fisibel bagi tatanan kejurusan, program studi, kurikulum serta variable proses dan piranti pendukung lainnya.

Status Fakultas dan kedudukan alumni Syari'ah dalam konstelasi institusi pendidikan tinggi hukum di negeri ini harus ditingkatkan. Seleksi dan promosi tenaga pengajar harus lebih didasarkan atas meritokrasi dan profesi. Perpustakaan harus menjadi prioritas untuk dilengkapi.

Perbaikan apapun dari segi struktur tidak akan berhasil banyak, malah bisa menjadi bumerang, jika tidak dilandasi oleh perubahan kultur. Terbinanya sikap ilmiah yang mantap serta budaya akademis yang baik di kalangan sivitas akademika menjadi mutlak diperlukan. Gabungan dari perbaikan struktur dan cultural inilah yang akan mengantarkan studi Hukum Islam di IAIN khususnya dan perguruan tinggi umumnya yang akan membawa ke masa depan yang lebih cerah dan peran yang lebih aktif-konstruktif bukan saja bagi kemaslahatan umat Islam tetapi demi kesejahteraan bangsa Indonesia seluruhnya, bahkan bagi kemajuan kemanusiaan.

Dengan demikian masih terlalu jauh dan banyak persoalan yang menghadang dihadapan kita untuk membawa IAIN Alauddin menjadi universitas dan menempatkan fakultas Syari'ah sebagai salah satu fakultas dengan bidang kajian keilmuan adalah ilmu hukum secara luas (umum dan khusus).

Perlu segera dibicarakan secara serius kemungkinan IAIN Alauddin Makassar menjadi universitas termasuk menjadikan Fakultas Syari'ah sebagai fakultas umum (hukum). Pembicaraan tersebut tidak hanya dalam bentuk wacana seperti yang hingga kini berkembang akan tetapi perlu dilakukan pembicaraan melalui forum-forum ilmiah serta penelitian-penelitian yang lebih komprehensif.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, oleh karena hanya dengan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian ini dibiayai oleh DIKS IAIN Alauddin Makassar Tahun 2003 dan telah diseminarkan dihadapan dosen-dosen IAIN Alauddin Makassar.

Kepada Rektor IAIN Alauddin Makassar, saya ucapkan terima kasih atas perkenangnya untuk melakukan penelitian, Demikian juga terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Pusat Penelitian IAIN Alauddin Makassar dan Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Makassar atas persetujuannya untuk melakukan penelitian.

Penelitian ini berlokasi di IAIN Alauddin Makassar dengan fokus penelitian adalah Fakultas Syari'ah. Semoga penelitian ini ada manfaatnya dalam pengembangan khazanah ke-ilmuan dan perobahan IAIN Alauddin menjadi Universitas, amin.

Makassar, Desember 2003

Wassalam
penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'A' followed by a more complex, cursive script.

Ahkam Jayadi, S.H, MH.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA SAMBUTAN	ii
IDENTITAS PENELITI	iii
SURAT KETERANGAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II. METODE PENELITIAN	8
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	8
B. Lokasi Penelitian	8
C. Jenis dan Sumber Data	9
D. Pengolahan dan Analisis Data	9
BAB III. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tujuan Perguruan Tinggi	13
B. IAIN Sebagai Perguruan Tinggi	14
C. Tujuan IAIN	17
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Lahirnya Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin	24
B. Kondisi Objektif Fakultas Syari'ah	34
C. Harapan dan Kenyataan Menuju Universitas	35
D. Beberapa Catatan	46

BAB V. PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Gugatan terhadap eksistensi perguruan tinggi mulai muncul sekitar sepuluh tahun terakhir. Gugatan tersebut muncul berkaitan dengan semakin banyaknya alumni perguruan tinggi yang menganggur. Perguruan tinggi tidak lagi mampu menjadi lembaga intelektual yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan yang multi dimensi. Berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat seperti: masalah hukum, yang hingga kini salah satu ekemennya yaitu *lembaga peradilan semakin sulit untuk diharapkan menegakkan keadilan* di tengah masyarakat. Hukum dan keadilan menjadi semakin elit. Hukum dan keadilan hanya menjadi milik orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki kekuasaan.

Lembaga politik (*in casu partai politik*) yang seharusnya menjadi institusi yang diharapkan dapat menjadi dewa penyelamat terhadap masa depan masyarakat bangsa dan negara agar semakin kondusif, justru yang terjadi adalah sebaliknya menjadi semakin terpuruk. *Lembaga-lembaga politik sebaliknya justru menjadi sumber persoalan dan sumber perpecahan masyarakat, bangsa dan negara*. Elit-elit politik, baik yang duduk di lembaga-lembaga legislatif maupun yang duduk di

lembaga eksekutif justru hanya sibuk memikirkan diri sendiri dan saling berebut kekuasaan. Lembaga legislatif yang seharusnya menjadi tempat orang-orang terbaik bangsa untuk menata dan memperbaiki bangsa dan negara ini justru menjadikan *Dewan Perwakilan Rakyat menjadi arena ring tinju.*

Hal yang tidak kalah menariknya adalah persoalan ekonomi. Bangsa Indonesia hingga kini masih terpuruk kehidupan ekonominya. Jumlah orang miskin setiap saat semakin bertambah yang pada akhirnya juga melahirkan semakin berjubelnya pengangguran. Fenomena yang sangat menyedihkan adalah ramainya penggusuran di mana-mana yang celaknya pejabat-pejabat yang memerintahkan penggusuran tersebut seakan tidak lagi memiliki perikemanausiaan, tidak lagi memiliki persaaan kemanusiaan dengan membiarkan orang-orang tergusur tersebut terlantar dan tidak peduli orangtua hingga anak-anak yang kehilangan tempat tinggal dan masa depan.

Celaknya gugatan kepada eksistensi perguruan tinggi tidak hanya ditujukan kepada lembaga-lembaga perguruan tinggi umum akan tetapi juga menerpa perguruan-perguruan tinggi agama. Tidak terkecuali lembaga perguruan tinggi agama seperti **Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar.**

Gugatan tersebut menjadi semakin komplek oleh karena di tengah gugatan akan eksistensi perguruan tinggi yang semakin mencemaskan tersebut perguruan tinggi juga dituntut untuk tetap eksis agar tetap bisa bertahan agar tidak dibubarkan dan tetap mempertahankan kehidupan lembaganya yang selama ini menjadi tempat

banyak orang memperoleh dan mempertahankan kehidupannya, baik sebagai dosen, tenaga administratif maupun tenaga-tenaga harian dan yang lainnya.

Akselerasi tuntutan kehidupan yang begitu cepat ternyata memang tidak dapat diimbangi oleh kemampuan perguruan tinggi untuk menyahuti dan mengikuti hal tersebut. Dari sudut status dan gengsi luaran suatu lembaga pendidikan bila kita mencoba kilas balik beberapa dasa warsa yang lalu, dengan jelas dapat memperlihatkan degradasi dan fluktuasi dari fenomena tersebut. Sekitar tiga dasa warsa yang lalu seorang lulusan sekolah lanjutan atas (dulu disebut Sekolah Menengah tingkat Atas/SMA dan kini Sekolah Menengah Umum/SMU) masih langka di tengah masyarakat dan untuk itu masih susah ditemukan ada yang menganggur.

Perkembangan selanjutnya alumni perguruan tinggi yang berstatus sarjana muda (BA) masih sebuah status yang sangat bergengsi dan diperebutkan oleh lapangan kerja yang ada. Seperti halnya lulusan SMU masih sangat sulit pada waktu itu kita temukan sarjana muda yang menganggur. Demikian juga perkembangan selanjutnya untuk tingkat sarjana masih sebuah status yang bergengsi oleh karena sebagian besar masyarakat kita tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan pada tataran perguruan tinggi (sarjana).

Sungguh sebuah fenomena yang memilukan dan meresahkan melihat situasi dan kondisi sekarang ini yang ada di tengah masyarakat, oleh karena orang-orang yang berstatus sarjana pun sudah banyak yang menganggur. Apakah masalah tersebut

sepenuhnya menjadi kesalahan perguruan tinggi? Tentu saja sebuah pertanyaan yang tidak sederhana jawabannya.

Ketika kita membicarakan dan mengkaji persoalan perguruan tinggi, maka di dalamnya ada banyak aspek yang saling terkait satu sama lain yang harus menjadi ruang pembahasan. Secara umum ada tiga aspek atau elemen yang berperan dalam kehidupan sebuah lembaga perguruan tinggi. **Elemen in put yang akan menuju elemen proses yang pada akhirnya menghasilkan elemen out put.** Ketiga elemen tersebut harus hidup dalam suatu ruang yang memadai yang kita kenal dengan infrastruktur dan supra struktur perguruan tinggi yang pada akhirnya melahirkan alumni atau luaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa dan negara.

Tuntutan kehidupan modern dengan era informasi dan globalisasinya menyebabkan pentingnya lembaga pendidikan formal (mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi) tidak dapat lagi dipungkiri. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari akselerasi pembangunan menuju peradaban sains dan teknologi yang menuntut kemampuan dan kualitas di segala bidang kehidupan.

Meningkatnya persepsi dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan , maka di sisi lain *pendidikan melonjak menjadi mahal*, padahal seluruh lapisan masyarakat, baik dari golongan miskin sampai kepada yang milyuner dituntut untuk menikmati setiap jenjang pendidikan. Pada tataran inilah lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi menghadapi permasalahan yang serba rumit karena secara diameteral terkait dengan perguruan tinggi sebagai suatu sistem pendidikan yang menjanjikan masa depan cerah dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah.

Pemandangan kontras ini dapat dinikmati setiap hari di setiap perguruan tinggi yang ada, ketika seorang yang dari golongan *the have* berangkat ke kampus untuk kuliah, kendaraan yang digunakan bukanlah kendaraan umum akan tetapi mobil pribadi yang serba mewah, dengan pakaian ala jet set dan didukung oleh buku-buku literatur yang hanya tinggal menunggu dibaca, serta kondisi rumah yang nyaman dan sejuk untuk belajar. Sementara golongan *the have not* berangkat ke kampus untuk kuliah dengan kebanyakan jalan kaki, pakaian apa adanya serta makanan yang kurang gizi. Buku-buku literatur yang siap untuk dibaca namun tidak ada. Tinggal di kamar kontrakan dengan ukuran dua kali dua meter yang sekaligus merupakan tempat masak, tempat belajar, tempat tidur dan tempat menerima tamu.

Hal tersebut semakin problematik bila dikaitkan dengan mutu sebuah perguruan tinggi yang akan menelorkan alumni yang diperlukan di tengah masyarakat. Sebab masyarakat kita sekarang tengah menggugat mutu sarjana luaran dari setiap perguruan tinggi, tidak terkecuali alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) secara umum dan alumni Fakultas Syari'ah secara khusus yang tidak dapat dimanfaatkan oleh lapangan kerja yang ada.

Siapakah sebenarnya yang tidak bermutu, IAIN (fakultas Syari'ah) sebagai lembaga pendidikan tinggi atau luarannya atautkah kondisi lembaga pendidikan ini yang tidak lagi mampu untuk mengikuti akselerasi perkembangan kehidupan di tengah masyarakat dan untuk itu harus segera merubah bentuknya menjadi perguruan tinggi umum (fakultas Syari'ah menjadi fakultas hukum/umum).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk membatasi dan menghindari tidak fokusnya kajian penelitian ini, maka berikut ini dirumuskan masalah yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang dipelajari dan diajarkan di fakultas Syari'ah.
2. Bagaimana peluang dan tantangan fakultas Syari'ah dalam menghadapi perubahan IAIN Alauddin menuju Universitas.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun data tentang apakah yang menjadi objek dan ruang lingkup bidang kajian keilmuan yang dipelajari di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menghimpun data tentang peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin dalam menghadapi dan menuju perubahan IAIN Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Setelah terwujudnya tujuan penelitian, yaitu dengan adanya data serta temuan-temuan sebagaimana yang menjadi tujuan penelitian ini, maka diharapkan hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak Fakultas Syari'ah maupun Pimpinan IAIN Alauddin Makassar serta Pemerintah (Departemen Agama cq Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam dan Direktorat Perguruan Tinggi Islam) dalam membuat kebijakan menuju pengembangan IAIN Alauddin Makassar menjadi perguruan tinggi umum (universitas).

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikategorikan ke dalam *tipe penelitian deskriptif*. Penelitian yang uraiannya bersifat deskriptif. Penelitian ini akan mengkaji infra struktur dan supra struktur serta sarana dan prasarana yang ada pada Fakultas Syari'ah untuk kemudian dikaitkan dengan kemungkinannya menjadi lembaga perguruan tinggi dengan bentuk universitas.

2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat yang menjadi objek penelitian ini adalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar yang beralamat di Jalan Sultan Alauddin Nomor 63 Makassar. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan akademis oleh karena fakultas ini merupakan tempat penulis bekerja sebagai salah satu dosen. Pertimbangan lain yang menjadi alasan sehingga penulis mengambil lokasi penelitian di fakultas ini, oleh karena dengan munculnya wacana untuk menjadikan IAIN Alauddin sebagai universitas yang diawali sejak Rektor Prof. Dr. H. Abdul Muin Salim, maka kita mau atau tidak kita setuju atau tidak maka fakultas

ini juga harus siap menghadapi kemungkinan untuk merubah IAIN Alauddin menjadi universitas. Untuk itu tahap awal yang sangat strategis menghadapi hal tersebut adalah melakukan penelitian berkaitan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Fakultas Syari'ah untuk menjadi fakultas umum dalam lingkungan IAIN Alauddin bila kelak menjadi universitas.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian yang akan dihimpun adalah *data kualitatif dan dilengkapi dengan data kuantitatif*. Dalam proses pengumpulan data penelitian, maka data yang akan dikumpulkan ada dua jenis yaitu: data kualitatif dan data statistik. Data tersebut akan diperoleh melalui buku-buku dan bahan-bahan bacaan yang ada serta dokumen-dokumen dan data statistik yang dimiliki oleh Fakultas Syari'ah IAIN Aaluddin Makassar.

2.4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini akan diolah secara **kualitatif**. Untuk melengkapinya, maka digunakan juga analisis **deskriptif** guna memperoleh kesimpulan. Dengan demikian metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. **Analisis kualitatif** menurut Fielstead¹ adalah suatu metode yang mengacu

¹ William J. Fielsted, (ed), *Qualitative methodology*, (Chicago: Markham, 1970), h. 6.

pada strategi penelitian, seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, partisipasi total ke dalam aktifitas mereka yang diselidiki, kerja lapangan dan sebagainya, yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi tangan pertama mengenai masalah sosial empiris yang hendak dipecahkan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti mendekati data sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan kategoris dari data itu sendiri, dan bukannya dari teknik-teknik yang dikonsepsikan sebelumnya, tersusun secara kaku, dan dikuantifikasi secara tinggi yang memasukkan saja dunia sosial empiris ke dalam definisi operasional yang telah disusun peneliti.

Suparlan² mengatakan bahwa kajian kualitatif adalah:

- 1) Menyajikan deskripsi yang mendalam dan lengkap, sehingga dalam informasi-informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya.
- 2) Bersifat grounded atau berpijak di bumi, yaitu betul-betul empirik sesuai konteksnya.
- 3) Bercorak holistik.
- 4) Menyajikan informasi yang berfokus dan berisikan pernyataan-pernyataan yang perlu saja, yaitu mengenai pola-polanya.
- 5) Mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan para pembacanya karena disajikan dengan bahasa biasa dan bukannya dengan bahasa teknis angka-angka.

² Parsudi Suparlan, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: Kajian Wanita Universitas Indonesia, 1994), h. 8.

Menurut Moleong³ analisis data adalah prosedur mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan Poerwandari⁴ untuk data kualitatif, semua informasi yang diberikan, terlebih dahulu dibaca dan diteliti. Setelah itu, *pertama*; mengorganisasikan data tersebut secara rapi, sistematis dan selengkap mungkin. Pengorganisasian data yang sistematis dimaksudkan untuk memperoleh kualitas data yang baik, mendokumentasikan analisis yang dilakukan, menyimpan data dan analisis yang berkaitan dalam penyelesaian penelitian.

Kedua; koding data pada materi yang diperoleh. Pada tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Koding data ini dimaksudkan untuk dapat mengorganisasi dan mensistematisasi data secara lengkap, utuh dan mendetail sehingga dapat memunculkan gambaran tentang topik yang dipelajari dan pada akhirnya akan dapat menemukan makna dari data yang dikumpulkan.

Ketiga; kepekaan teoretis adalah dapat mengembangkan teori dari dasar atau peneliti sedang berteori. Teknik-teknik meningkatkan kepekaan teoretis yaitu (1) mengembangkan pertanyaan-pertanyaan, (2) menganalisis kata, frase, kalimat, (3) analisis tahap lanjut melalui perbandingan.

³Lexi J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remadja Rosdakarya, 1998), h. 104

⁴E.Kristi Poerwandari, *Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fak. Psikologi Universitas Indonesia, 1998).

Keempat; pengujian terhadap dugaan adalah merupakan kesimpulan sementara. Dugaan yang berkembang harus terus dipertajam, diuji ketepatannya. Pengujian terhadap dugaan berkaitan erat, bahkan bertumpuk dengan upaya mencari penjelasan-penjelasan yang berbeda mengenai data yang sama.

Kesatuan dan keutuhan dari semua hal tersebut di atas diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan penelitian yang sejauh mungkin dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Dengan demikian pada saatnya nanti hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Tujuan Perguruan Tinggi

Dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) disebutkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah: untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Sedangkan PP No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan tujuan pendidikan tinggi untuk:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

3.2. IAIN Sebagai Perguruan Tinggi

Penyakit lama yang menggerogoti IAIN¹ di Indonesia dan sudah bukan rahasia internal belaka, adalah persoalan anggaran yang sangat terbatas. Demikian juga dengan struktur dan iklim keilmuan di IAIN juga perlu dipertegas arahnya. Apakah IAIN akan tumbuh sebagai lembaga dakwah, layanan sosial, lembaga keilmuan, ataukah industri jasa pendidikan yang akan melahirkan tenaga-tenaga terampil siap pakai?

Jawabnya tentu saja tidak sederhana mengingat berbagai persoalan telah menyatu menjadi krusial dan setiap saat dapat ditemukan di IAIN. Demikian juga dengan klaimnya yang begitu banyak dan bersifat multidimensi maka sosok IAIN sebagai lembaga keilmuan sering dipertanyakan. Terlebih lagi dengan munculnya gagasan untuk menjadikan IAIN sebagai Universitas sebagaimana telah dimulai oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kini berubah menjadi Universitas Islam Jakarta.

¹Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo, *Problem dan Prospek IAIN Antologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Departemen Agama R.I. 2000) h. pengantar

Bukan pekerjaan yang mudah untuk menempatkan IAIN² ke dalam jajaran perguruan tinggi umum Indonesia. Lembaga ini memiliki riwayat tersendiri yang berbeda dari lembaga pendidikan tinggi lain. Awalnya, ia tidak didirikan untuk memenuhi kebutuhan akademik saja, melainkan juga agama, ideologi dan bahkan politik. Kekhasan lain adalah, jika di PTU agama Islam sekadar menjadi salah satu mata kuliah, di lembaga ini ditetapkan sebagai fokus kajian utama. Selain itu, hanya siswa Muslim yang dapat diterima, dan keberhasilan mahasiswa tidak hanya diukur dari parameter akademik tetapi juga perilaku. Meskipun demikian, IAIN menyandang status yang sama dengan lembaga pendidikan negeri lain, yakni perguruan tinggi negeri (PTN). Jenjang pendidikannya juga sama S1, S2 dan S3, walaupun klasifikasi organisasi ke fakultasan dan jurusan tidak selalu didasarkan pada pertimbangan akademik.

Ciri khas yang demikian sering membuat sistem pengelolaan IAIN serba salah. Demi kepentingan agama dan ideologi, ia dikelola Departemen Agama (Depag), bukan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), institusi yang berwenang mengelola seluruh lembaga pendidikan. Akibatnya, seluruh pembiayaan diambil dari sektor agama dan bukan dari anggaran pendidikan. *Ini artinya sama dengan memperlakukan IAIN seperti majlis taklim, haji, umrah, masjid dan sebagainya.* Sungguh menyedihkan sekali.

Disebabkan alasan yang sama, sistem rekrutmen mahasiswanya berbeda dari perguruan tinggi lain, dimana pola Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN)

² Ibid

yang jamak dipakai, tidak diterapkan. Oleh karena tidak ada standar yang sama, kualifikasi akademik dan profesional IAIN menjadi sulit diukur. Itulah sebabnya lulusan IAIN, meskipun secara formal memiliki gelar sarjana, sering tidak diakui pasaran. Misalnya, sarjana lulusan Fakultas Tarbiyah (pendidikan) tidak dianggap sama dengan lulusan IKIP (sekarang telah berubah menjadi universitas), melainkan tetap dianggap sebagai sarjana agama (S.Ag). Sama halnya dengan alumni Fakultas Syari'ah (hukum Islam); mereka tidak bisa menjadi pengacara atau notaris. Semua masalah ini terpulang kembali pada corak dasar IAIN yang menggabungkan berbagai kepentingan, mulai dari agama, pendidikan, ideologi, sampai ilmu pengetahuan yang pada akhirnya tidak jelas alokasi keahlian yang harus diberikan.

Posisi IAIN merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Karena itu, IAIN secara keseluruhan juga tidak bisa mengisolasi diri dari perubahan-perubahan paradigma, konsep, visi dan orientasi baru pengembangan pendidikan tinggi/Perguruan Tinggi Nasional, dan bahkan internasional, seperti dirumuskan dalam Deklarasi UNESCO tentang Perguruan Tinggi pada 1998. Sayangnya hal tersebut belum banyak direspons oleh civitas akademika IAIN Alauddin.

Beberapa masalah pokok IAIN secara umum adalah: *Pertama*, IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Di antara ketiga lingkungan ini, kelihatannya peran IAIN lebih besar pada masyarakat, karena kuatnya orientasi kepada dakwah daripada pengembangan ilmu pengetahuan.

Kedua, kurikulum IAIN belum mampu meresponi perkembangan iptek dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini disebabkan terutama karena bidang kajian agama yang merupakan spesialisasi IAIN kurang mengalami interkasi dan *reapproachment* dengan ilmu-ilmu umum, bahkan masih cenderung dikotomis. Kurikulum IAIN masih terlalu berat pada ilmu-ilmu yang bersifat normatif, sedangkan ilmu-ilmu umum yang dapat mengarahkan mahasiswa kepada cara berfikir dan pendekatan yang lebih empiris dan kontekstual nampaknya masih belum memadai.

3.3. Tujuan IAIN

Sebagai perguruan tinggi agama sebagaimana dikemukakan di atas tentu saja memiliki perbedaan dengan perguruan tinggi umum. Untuk itu hal yang perlu dipertanyakan sekarang adalah apakah yang dipelejadi dan diajarkan di Fakultas Syari'ah IAIN? Apakah sinkron antara nama dengan entitas yang diberi nama?

Sesuai dengan uraian sebelumnya di atas, syari'ah merupakan suatu bidang kajian yang sangat luas, hingga akhirnya mengakibatkan terjadinya kurikulum yang sangat berat, atau berujung pada pendangkalan kemampuan peserta didik. Mahasiswa mengetahui banyak hal, tetapi tidak ada satu bidangpun di antaranya yang dikuasai secara professional. Ini tentu menuntut adanya pembedaan spesialisasi keilmuan yang lebih fisibel dan penekanan yang lebih praksis.

Mahkamah Agung dalam SE No. MA/Kumdil/1589/IX/1998 tertanggal 2 September 1998, menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk mengikuti ujian teknis

hukum bagi pengacara praktik adalah “Sarjana Hukum atau Sarjana Syari’ah”. Kenyataan bahwa semua lulusan IAIN kemudian diberi gelar Sarjana Agama (S.Ag) mengaburkan kompetensi alumni fak. Syari’ah dan mempersulit mereka ketika ingin berkiprah di dunia profesi.

Mengacu pada ketentuan-ketentuan yang termaktub pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, maka tujuan lembaga pendidikan tinggi negeri yang mengkhususkan diri pada kajian ke-Islaman ini dirumuskan oleh RIP IAIN sebagai berikut: IAN bertujuan untuk membantu terbinanya sarjana Islam, yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, bersikap rasional dan dinamis, berpikir filosofis, berpandangan luas dan mampu bekerjasama dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional.

Dengan demikian yang menjadi obyek dan ruang lingkup studi di IAIN adalah Islam. Apakah yang dimaksud dengan Islam di sini? Studi Islam paling tidak mencakup tiga bidang pokok. Yang pertama Islam sebagai ajaran, yang terwujud dalam bentuk wahyu Ilahi yang terhimpun dalam Al-Qur’an dan dalam bentuk Sunnah yakni panduan Rasulullah SAW bagi umatnya yang terhimpun dalam Hadist. Dalam hal ini studi Islam bertumpu pada studi kewahyuan yang diwujudkan dalam bentuk matakuliah sumber al-Qur’an dan al-Hadist sekalian dengan perangkat ilmu-ilmu al-Qur’an (‘ulum al-Quran) dan ilmu-ilmu Hadist (‘ulum al-Hadist). Ilmu-ilmu

ini, sejak beberapa waktu yang lalu menjadi jurusan Tafsir Hadist di fak. Ushuluddin dan merupakan program studi khusus pada tingkat Pascasarjana.

Pada sisi lain Islam juga dikaji sebagai bagian dari pemikiran, sebagai bagian dari fiqh dalam arti luas, sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam al-Qur'an. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam (*Islamic thought*) terlihat ada lima bidang pemikiran Islam yang menonjol, yaitu: akidah-teologi ('ilm al-kalam), hukum dalam arti luas (syari'ah), filsafat (hikmah/'irfan/falsafah), akhlak-sufisme (tashawuf).

Islam pada tingkat berikutnya merupakan pengalaman dan penerapannya dalam kehidupan. Bersumberkan pada al-Qur'an dan Sunnah yang kemudian dijabarkan dalam berbagai pemikiran, ajaran Islam kemudian diamalkan dan diterapkan oleh umat Islam hingga membentuk peradaban Islam yang telah berabad-abad menyinari dunia. Islam sebagai pengalaman yang menonjol dikaji dan dikembangkan IAIN selama ini adalah aspek pendidikan (tarbiyah), dakwah dan tentu saja hukum, sedangkan aspek-aspek lain kelihatannya masih terabaikan.

Khusus untuk studi Hukum Islam, atau lebih tepat kajian syari'ah, mencakup tiga bidang, yakni studi kewahyuan sebagai sumber utama hukum Islam; studi pemikiran yang mengurai perkembangan pemikiran tentang hukum di kalangan umat Islam dan studi terapan yang mengkaji pengalaman dan implementasi serta perkembangan interaksi kaidah-kaidah tingkah-laku tersebut dengan kondisi empiris masyarakat muslim.

Kajian ini terkait erat dengan perdebatan di kalangan para pengkaji hukum Islam kontemporer tentang apakah syari'ah itu "*substantive rules*" atau *metodologi*. Perbincangan ini mengarahkan perhatian pada persoalan tentang apakah proses belajar-mengajar di fakultas Syari'ah lebih terfokus pada pendidikan akademis atau professional. Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa studi syari'ah pada tingkat Perguruan Tinggi melingkupi baik pendidikan akademis dan juga pendidikan professional.

Oleh karenanya setiap fakultas harus menentukan pilihannya, dan tidak tertutup, malah lebih baik, mengembangkan keduanya. Namun harus dipilah antara program akademis dari yang professional. Program akademis terutama ditujukan untuk peserta didik yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, strata dua dan tiga. Konsekwensi logisnya adalah kurikulum yang ditawarkan kepada mereka juga menjadi berbeda penekanan dan metodenya. Adalah keliru memaksakan kurikulum yang padat dengan pematangan akademis bagi mereka yang lebih tertuju pada persiapan professional. Ini terlihat dari terlalu dipaksakannya setiap mahasiswa yang harus menulis skripsi yang terkadang jauh relevansinya dari dunia kerja yang akan dihadapi di kemudian hari, sedangkan suatu program kerja lapangan atau magang mungkin lebih bermanfaat.

Kompetensi minimal seorang tamatan strata satu adalah seorang tenaga ahli pelaksana, sedangkan kemampuan mengembangkan penerapan iptek dalam peran improvisasi dan inovasi proses adalah kompetensi tamatan starata dua, yang

kemudian ditingkatkan menjadi kemampuan mengembangkan dan menciptakan iptek bagi lulusan strata tiga.

Adalah kecenderungan selama ini para perencana dan pengelola program studi syari'ah berpikir terlalu ideal hingga menjejali kurikulum (*overburden curriculum*) dengan berbagai matakuliah, sebagai bersifat 'pesanan' dan yang lain bersifat 'warisan', yang memandang ideal tetapi kurang relevan dengan upaya penyiapan peserta didik dalam menghadapi dunia profesi. Ini terkait erat dengan tidak jernihnya perumusan tujuan program dan sosok lulusan yang ingin dicapai. Uraian satuan pelajaran yang diberikan, contohnya, lebih mempersiapkan mahasiswa sebagai ahli 'sejarah hukum' yang berkutat dengan pemikiran legal-ideal masa lalu, tetapi kurang mempersiapkan mereka sebagai ahli hukum yang bergulat menghadapi problema hukum positif masa kini.

Hampir mustahil dengan program studi formal di perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang menguasai segalanya tentang hukum Islam. Oleh sebab itu harus diperjelas spesialisasi dan disiplin bidang studinya. Pemekaran spesialisasi, oleh karenanya penghapusan jurusan, adalah hal yang lumrah dalam dunia perguruan tinggi, hingga tidak perlu harus bertahan bahwa jurusan/program studi yang ada harus permanen.

Oleh sebab itu, salah satu cara penilikan yang harus dilakukan adalah dengan menengok sosok lulusan bagaimanakah yang telah dan ingin dihasilkan oleh program studi ini. Hal ini tentu terkait dengan kondisi dan proyeksi lapangan kerja yang ada dan yang berkembang.

Untuk itu Fakultas Syari'ah IAIN bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi sarjana yang memiliki kemampuan akademik dan professional yang menguasai, menerapkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan memperkaya kebudayaan dalam bidang kesyari'ahan. Para alumni fakultas syari'ah dipersiapkan untuk mengembang profesi yang pengetahuan dan keterampilan dalam disiplin ilmu kesyari'ahannya merupakan persyaratan dasar.

Sejak awal berdirinya, fak. Syari'ah ditujukan terutama untuk menyediakan tenaga ahli dalam bidang birokrasi pemerintahan yang menguasai hukum Islam yang memang sedang sangat dibutuhkan, terutama untuk mengisi jabatan hakim di jajaran peradilan agama dan jabatan lain dalam lingkup Departemen Agama.

Oleh karenanya, visi yang paling fundamental barangkali adalah kejernihan memandang bahwa fakultas Syari'ah khususnya dan IAIN umumnya pada dasarnya adalah lembaga pendidikan tinggi (*higher learning institution*), tegasnya lembaga ilmiah yang harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ilmiah dan akademis. Memandang lembaga ini lebih sebagai lembaga dakwah, dalam arti sempit, apalagi sebagai institusi birokratis yang kaku, hanya akan mempersulit pengembangan lembaga itu sendiri, terlebih dalam era global dewasa ini.

Dengan memperbandingkan tujuan pendidikan hukum secara umum, maka program studi hukum Islam di IAIN seyogyanya diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi sarjana yang:

1. mengenal hukum Islam secara menyeluruh dan menguasai bagian hukum Islam yang menjadi bidang konsentrasi studinya,
2. mengenal hukum positif di Indonesia secara umum dan menguasai bagian hukum positif di Indonesia yang menjadi bidang konsentrasinya,
3. menguasai landasan ilmiah dan dasar-dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum,
4. mengenal dan peka terhadap masalah-masalah keadilan dan kemasyarakatan,
5. memiliki kemampuan menganalisa masalah-masalah hukum dan masyarakat, dan,
6. mempunyai kemampuan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan problema kemasyarakatan (*law as social engineering*) dengan adil dan bijaksana serta berdasar pada prinsip-prinsip syari'ah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Lahirnya Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin

Lahirnya Fakultas Syari'ah tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan lahir dan terbentuknya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar (yang dulu dikenal dengan Ujung Pandang). Fakultas Syari'ah salah satu fakultas yang ada di IAIN Alauddin yang bidang pendidikan dan kajian ke-ilmuannya adalah dalam bidang *Hukum Islam* dan pencabangannya.

Babakan baru¹ dalam sejarah perguruan tinggi di Indonesia tercatat pada tahun 1950. Pada saat itu, ketika Pemerintah Republik Indonesia berpusat di Yogyakarta, sebagai penghargaan dari pemerintah, kota ini dijadikan *kota universitas*. Untuk golongan nasionalis diberikan Universitas Gajah Mada yang pada waktu itu adalah usaha swasta, kemudian dijadikan universitas negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950.

Golongan Islam diberikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950. PTAIN tersebut cikal

¹30 Tahun IAIN Alauddin, (Ujung Pandang: Balai Penerbitan IAIN Alauddin, 1996), h. 3-18.

bakalnya adalah dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (UII). Sesuai dengan bunyi konsiderans Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950 maka disebutkan bahwa, PTAIN dimaksudkan agar dapat mendidik tenaga ahli dalam ilmu agama Islam untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan negara. PTAIN juga memiliki tujuan untuk memberikan pengajaran tinggi dan menjadi pusat dari kegiatan untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan Agama Islam.

Dalam proses pengajarannya telah diletakkan asas untuk membentuk manusia yang taqwa, susila dan cakap serta mempunyai kesadaran bertanggung-jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya atas dasar Pancasila, kebudayaan Indonesia, di samping juga ditumbuhkan keinsyafan untuk memiliki pendirian hidup yang luas dan kuat. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan negara akan ahli pendidikan agama yang berpendidikan akademis bagi sekolah-sekolah lanjutan umum dan kedinasan, maka pemerintah (cq. Departemen Agama) mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1957.

Disebabkan luasnya cakupan ilmu Agama Islam yang meliputi berbagai aspek hidup dan kehidupan, maka pengembangan ilmu Agama Islam tidak lagi dapat ditampung dalam satu fakultas. Untuk itu diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1960 yang menggabungkan PTAIN di Yogyakarta dan ADIA di Jakarta pada tanggal 9 Mei 1960 menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan nama Al-Jamiah Al-Islamiah Al-Hukumiyah yang berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta. IAIN sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi memberikan pendidikan dan

pengajaran Agama Islam setingkat universitas serta menjadi pusat untuk mengembangkan dan memperdalam Agama Islam.

Maksud dan tujuan pendidikan IAIN ialah membentuk sarjana muslim yang mempunyai keahlian dalam ilmu Agama Islam, berakhlak mulia, cakap, serta mempunyai kesadaran dan bertanggung-jawab atas kesejahteraan umat, masa depan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. IAIN juga bertujuan untuk menyiapkan tenaga ahli agama yang terampil bagi keperluan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan situasi dan kondisi perguruan tinggi ketika itu, baik dalam skala nasional maupun regional Sulawesi, maka di Sulawesi Selatan terdorong untuk lahirnya ide dan gagasan untuk mengadakan lembaga pendidikan Islam yang berstatus negeri dalam jenjang perguruan tinggi, di samping perguruan tinggi swasta yang sudah ada. Berdasarkan ide dan gagasan itulah akhirnya lahir IAIN di Makassar yang kemudian menjadi IAIN Alauddin.

Ide dan gagasan untuk mendirikan IAIN di Makassar mulai muncul setelah berdirinya IAIN yang berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta. Ide dan gagasan tersebut lahir sehubungan dengan upaya pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama untuk mengembangkan IAIN di luar Yogyakarta dan Jakarta. Sebagaimana diketahui, pada saat peresmian pada tahun 1960 IAIN baru memiliki empat fakultas, dua di Yogyakarta, masing-masing: Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushuluddin. Dua fakultas yang ada di Jakarta adalah: Fakultas Adab dan Fakultas Tarbiyah. Sebagai realisasi maksud pemerintah untuk mewujudkan perguruan tinggi

agama negeri di luar Yogyakarta dan Jakarta, maka setelah dua tahun berdiri, yaitu pada tahun 1962, IAIN mulai merintis pembukaan Cabang di Makassar setelah berhasil membuka cabangnya di Kutaraja (Banda Aceh), Palembang dan Banjarmasin.

Ide dan gagasan membuka IAIN Cabang Makassar dari pihak Departemen Agama untuk pertama kalinya disampaikan oleh Sekjen Departemen Agama kepada Presiden Universitas Muslim Indonesia (UMI), H. Abd. Rahman Syihab, yang ketika itu sementara berada di Jakarta. Menanggapi gagasan itu, setibanya di Makassar, H. Abd. Rahman Syihab menyampaikannya kepada Ketua Badan Wakaf UMI, H. Andi Pangerang Petta Rani. Gagasan membuka IAIN Cabang Makassar yang dibawa dari Jakarta itu dalam waktu singkat mendapat sambutan baik di kalangan tokoh masyarakat dan mahasiswa UMI. Timbul pro-kontra terhadap gagasan itu, maka mahasiswa UMI yang mendukung gagasan itu diwakili oleh empat tokoh Pimpinan Dewan Mahasiswa, masing-masing Ya'la Tahir (ketua), Umar Syihab (wakil ketua), Idrus Nurdin (wakil ketua) dan M. Saleh Putuhena (sekretaris) berusaha untuk memperoleh dukungan dan untuk itu mereka menghubungi Gubernur Sulawesi Selatan/Tenggara, Presiden UMI dan Ketua Badan Wakaf UMI.

Gerakan yang dilakukan oleh tokoh mahasiswa tersebut tidak sia-sia, oleh karena pada bulan Januari 1962, Ketua Badan Wakaf UMI mengadakan rapat untuk membicarakan gagasan mendirikan IAIN di Makassar. Rapat pertama ini dipimpin oleh Andi Pangerang Petta Rani (Ketua Badan Wakaf UMI). Hadir dalam pertemuan

itu, selain anggota-anggota Badan Wakaf UMI, juga tokoh-tokoh masyarakat Islam, para dosen dan tokoh mahasiswa UMI.

Dalam rapat itu diputuskan bahwa untuk memperlancar dan mempermudah terwujudnya pendirian IAIN diusulkan untuk mengintegrasikan dua fakultas yang ada di UMI menjadi IAIN. Kedua fakultas itu adalah, Fakultas Hakim Agama dan Fakultas Guru Agama. Untuk terwujudnya hasil rapat itu, H. Abd. Rahman Syihab selaku Presiden UMI diberi mandat penuh untuk menjajaknya.

Setelah H. Abd. Rahman Syihab mengadakan kontak dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan/Tenggara, maka pada bulan Juni 1962, Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, pada waktu itu dijabat oleh Kol. Andi A. Rifai, mengutus H. Abd. Rahman Syihab bersama Eddy Agussalim Mokodompit, MA, menemui Menteri Agama untuk menyampaikan hasrat pemerintah dan masyarakat Islam daerah ini untuk membuka IAIN, sesuai hasil rapat Badan Wakaf UMI. Menteri Agama, yang menerima delegasi ini menyambut baik utusan tersebut, dan sangat gembira karenanya maksud tersebut langsung disetujui untuk penegerian dua fakultas UMI menjadi IAIN Yogyakarta Cabang Makassar. Oleh karena Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, tidak menyanggupi penegerian dua fakultas tersebut sekaligus, maka ditetapkanlah penegeriaannya secara bertahap. Untuk tahap pertama ditetapkan penegerian Fakultas Syari'ah UMI, yang sebelumnya adalah Fakultas Hakim Agama menjadi Fakultas Syari'ah IAIN pada tahun 1962 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 75 Tahun 1962, Tanggal 17 Oktober 1962 yang menetapkan berdirinya Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta Cabang Makassar.

Sebagai realisasi Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, Gubernur membentuk Panitia Penegerian Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta Cabang Makassar yang diketua oleh H. Aroeppala. Berdasarkan usul dari Gubernur Sulawesi Selatan/Tenggara, Kol. Andi A. Rifai dan Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Kol. M. Yusuf, panitia menetapkan tanggal 10 Nopember 1962 sebagai hari peresmian berdirinya IAIN Cabang Makassar. Usul tersebut didasarkan pada pertimbangan:

Pertama, agar berdirinya IAIN mempunyai kesan yang mendalam bagi masyarakat Sulawesi Selatan, maka disesuaikan dengan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Hari Pahlawan. Apa lagi, peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember 1962 secara nasional dipusatkan di Makassar dan dihadiri oleh Jenderal Abd. Haris Nasution, dan Soeharto selaku Komandan Mandala Pembebasan Irian Barat.

Kedua, waktu terbitnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang penegerian Fakultas Syari'ah UMI menjadi IAIN Cabang Makassar berdekatan dengan Hari Pahlawan 10 Nopember.

Atas dasar pertimbangan itu, maka pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 1962 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1382 H, tibalah saatnya peristiwa yang bersejarah bagi dunia pendidikan Islam di Makassar khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Bertempat di Kampus UMI Jl. Kakatua No. 27, berlangsunglah upacara peresmian penegerian Fakultas Syari'ah IAIN Cabang Makassar yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Pahlawan Nasional, ditandai dengan

penandatanganan *Piagam Peresmian oleh Menteri Agama R.I. Saifuddin Zuhri*. Turut hadir dan membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi dalam piagam peresmian tersebut adalah: Jenderal Abd. Haris Nasution, Menteri Pertahanan dan Keamanan Mayjen Soeharto, Komandan Mandala Pembebasan Irian Jaya, Mr. R.H.A. Soenarjo, Rektor IAIN Yogyakarta. Selain itu hadir pula Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Brigjen H. Andi Ahmad Rifai, pimpinan daerah lainnya, alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Piagam Peresmian yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan para saksi berbunyi:

“Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Nopember 1962, 12 Djumadil Akhir 1382 H, kami Menteri Agama Republik Indonesia menerima dengan resmi penyerahan Fakultas Syari’ah Universitas Muslim Indonesia dari Ketua Panitia Penegerian Fakultas Syari’ah tersebut, Sdr. Aroeppala. Pada hari ini pula dengan disaksikan oleh saksi-saksi di bawah ini, kami nyatakan dengan resmi “Fakultas Syari’ah Universitas Muslim Indonesia” tersebut menjadi “Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Cabang Makassar.”

Bersamaan dengan peresmian itu, ditetapkan pula H. Abd. Rahman Syihab sebagai Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah cabang Makassar.

Dalam perkembangan selanjutnya, di akhir tahun 1963 muncul gagasan untuk mendirikan tingkat doktoral di Fakultas Syari’ah IAIN Cabang Makassar, gagasan yang dipelopori oleh alumni sarjana muda yang ingin meneruskan pendidikannya.

Pimpinan IAIN Cabang Makassar, dalam menyambut gagasan tersebut mengadakan rapat dosen dan pimpinan IAIN yang memutuskan untuk membuka program pendidikan tingkat doktoral. Untuk memenuhi syarat-syarat pembukaan tingkat doktoral itu, maka diputuskan mengusulkan H. Abd. Rahman Syihab untuk dikukuhkan menjadi Guru Besar di Fakultas Syari'ah IAIN Cabang Makassar, dan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat menyediakan dana untuk mendatangkan dua Guru Besar dari Yogyakarta selaku dosen di Fakultas Syariah Cabang Makassar. Hal itu disebabkan oleh karena pengadaan Guru Besar merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk pembukaan program tingkat doktoral. Dengan terpenuhinya syarat-syaratnya, program tingkat doktoral dimulai pada tahun 1965.

Perkembangan selanjutnya dari IAIN Cabang Makassar adalah munculnya ide untuk menjadikan IAIN Cabang Makassar menjadi perguruan tinggi yang berdiri sendiri. Harapan untuk mewujudkan IAIN berdiri sendiri bagi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya dan masyarakat Indonesia Bagian Timur pada umumnya mulai menjadi perhatian masyarakat Indonesia Bagian Timur. Perhatian masyarakat mulaimuncul dan didukung oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 27 Tahun 1963, tentang perubahan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960 yang antara lain menyatakan bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga jenis fakultas, IAIN dapat digabung menjadi satu Institut tersendiri dengan Keputusan Menteri Agama. Untuk memenuhi ketentuan itu diupayakan adanya tiga jenis fakultas IAIN di Makassar.

Upaya untuk mewujudkan IAIN tersendiri di Makassar, mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Rektor IAIN Yogyakarta. Gubernur dalam dukungannya mengeluarkan Surat Rekomendasi No. PPK/4/13/9 tertanggal 14 April 1965, yang meminta persetujuan Menteri Agama untuk menegerikan Fakultas Agama UMI menjadi Fakultas Ushuluddin IAIN sekaligus mengusulkan berdirinya IAIN di Makassar dengan nama **“IAIN ALAUDDIN.”**

“Alauddin” yang menjadi nama IAIN yang diusulkan adalah gelar Raja Gowa XIV (1593-1639) I Mangnerangi Daeng Manrabbia, kakek Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVI. Setelah meninggal ia diberi gelar *Tumenanga Rigaukannya* (yang mangkat dalam kebesaran kekuasaannya). Beliau adalah Raja Gowa pertama yang menerima Islam sebagai agama kerajaan, maka kepadanya diberi gelar **“Sultan Alauddin.”** Nama Alauddin bagi IAIN Makassar mula pertama dicetuskan oleh para pendiri IAIN di daerah ini, di antaranya Andi Pangerang Pettarani. Alasan yang mendasari penamaan itu, karena sampai pada saat itu IAIN di empat propinsi yang berdiri sendiri mengambil nama-nama tokoh penyebar Islam di masing-masing daerah mereka. .

Sultan Alauddin yang diusulkan untuk diabadikan namanya sebagai nama IAIN di Makassar, selain karena ia adalah Raja Gowa pertama menerima Islam, juga memiliki andil yang besar dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dan dikawasan Indonesia Bagian Timur. Dengan demikian penamaan ini mengandung

harapan peningkatan kejayaan Islam di masa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan di Indonesia Bagian Timur pada umumnya.

Menanggapi usul masyarakat dan Pemerintah Sulawesi Selatan tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No. 21 tahun 1965 tertanggal 13 Mei 1965, tentang pembentukan Panitia Persiapan Pembukaan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Sulawesi Selatan di Makassar. Sebagai tindak lanjut dari kerja panitia tersebut terbitlah Surat Keputusan Menteri Agama No. 79 tanggal 28 Oktober 1965, tentang persetujuan berdirinya IAIN Alauddin di Makassar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama di atas, pada tanggal 10 Nopember 1965, bertepatan dengan Dies Natalis ke tiga (3) Fakultas Syari'ah IAIN Cabang Makassar, bertempat di Kampus UMI, Jl. Kakatua Makassar, berlangsung upacara berdirinya IAIN Alauddin Makassar. Dalam upacara itu, K.H. Ali Yafi dilantik menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin, dan sebagai Kuasa Pejabat Rektor baru IAIN Alauddin, ditunjuk H. Aroeppala. Sejak berdirinya IAIN Alauddin Makassar hingga sekarang telah memiliki dua kampus tempat kegiatan administrasi perkantoran dan perkuliahan mahasiswa di Kampus I Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar dan Kampus II di Samata Kabupaten Gowa.

4.2. Kondisi Objektif Fakultas Syari'ah

Fakultas Syari'ah dalam perkembangannya sangat menggembirakan oleh karena fakultas ini mendapat respon di berbagai daerah di kawasan bagian timur Indonesia dengan terbentuk banyak kelas jauh (fakultas madya dan filial). Kelas jauh tersebut tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, di Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Maluku.

Fakultas yang tergolong fakultas madya (fakultas yang status dan eksistensinya diatur dengan Surat Keputusan Menteri Agama adalah: Fakultas Syari'ah di Makassar, fakultas Syari'ah di Watampone. Sedangkan fakultas filial (fakultas yang didirikan dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin) adalah: Fakultas Syari'ah di Majene, Fakultas Syari'ah di Raha, Fakultas Syari'ah di Gorontalo, Fakultas Syari'ah di Ambon.

Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Makassar² hingga Tahun Akademik 2002 telah menghasilkan alumni sebanyak: 5.521 sarjana, yang tersebar dalam empat jurusan (Peradilan, Ekonomi Islam, Sosial Politik, dan Perbandingan Mashab).

Jumlah tenaga dosen yang dimiliki sebanyak: 71 orang dosen dengan disiplin ilmu yang beragam dengan tingkat atau jenjang pendidikan dari S1 hingga S3. Tenaga dosen dengan jenjang S1 sebanyak 13 orang. Tenaga dosen dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 51 orang. Sedangkan yang menyelesaikan jenjang S3 (dokter) sebanyak 4 orang.

²Statistik IAIN Alauddin Makassar Tahun 2002.

4.3. Harapan dan Kenyataan Menuju Universitas

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) disebutkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah: untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan tujuan pendidikan tinggi untuk:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Persoalan lama yang menggerogoti IAIN di Indonesia dan sudah bukan rahasia internal belaka, adalah persoalan anggaran yang sangat terbatas. Demikian juga dengan struktur dan iklim keilmuan di IAIN juga perlu dipertegas arahnya. Apakah IAIN akan tumbuh sebagai lembaga dakwah, layanan sosial, lembaga keilmuan, ataukah industri jasa pendidikan yang akan melahirkan tenaga-tenaga

terampil siap pakai? Jawabnya tentu saja tidak sederhana mengingat berbagai persoalan telah menyatu menjadi krusial dan setiap saat dapat ditemukan di IAIN.

Demikian juga dengan klaimnya yang begitu banyak dan bersifat multidimensi maka sosok IAIN sebagai lembaga keilmuan sering dipertanyakan. Terlebih lagi dengan munculnya gagasan untuk menjadikan IAIN sebagai Universitas sebagaimana telah dimulai oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kini berubah menjadi Universitas Islam Jakarta.

Pekerjaan yang tidak mudah untuk menempatkan IAIN ke dalam jajaran perguruan tinggi umum Indonesia. Lembaga ini memiliki riwayat tersendiri yang berbeda dari lembaga pendidikan tinggi lain. Awalnya, ia tidak didirikan untuk memenuhi kebutuhan akademik saja, melainkan juga agama, ideologi dan bahkan politik. Kekhasan lain adalah, jika di PTU agama Islam sekadar menjadi salah satu mata kuliah, di lembaga ini ditetapkan sebagai fokus kajian utama. Selain itu, hanya siswa Muslim yang dapat diterima, dan keberhasilan mahasiswa tidak hanya diukur dari parameter akademik tetapi juga perilaku. Meskipun demikian, IAIN menyandang status yang sama dengan lembaga pendidikan negeri lain, yakni perguruan tinggi negeri (PTN). Jenjang pendidikannya juga sama S1, S2 dan S3, walaupun klasifikasi organisasi ke fakultasan dan jurusan tidak selalu didasarkan pada pertimbangan akademik semata sebagaimana biasanya.

Hal demikian sering membuat sistem pengelolaan IAIN serba salah. Demi kepentingan agama dan ideologi, ia dikelola Departemen Agama (Depag), bukan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), institusi yang berwenang mengelola

seluruh lembaga pendidikan. Akibatnya, seluruh pembiayaan diambil dari sektor agama dan bukan dari anggaran pendidikan. Ini artinya sama dengan memperlakukan IAIN seperti majlis taklim, haji, umrah, masjid dan sebagainya. Sungguh menyedihkan sekali. Disebabkan alasan yang sama, sistem rekrutmen mahasiswanya berbeda dari perguruan tinggi lain, dimana pola Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) yang jamak dipakai, tidak diterapkan. Oleh karena tidak ada standar yang sama, kualifikasi akademik dan profesional IAIN menjadi sulit diukur. Itulah sebabnya lulusan IAIN, meskipun secara formal memiliki gelar sarjana, sering tidak diakui pasaran. Misalnya, sarjana lulusan Fakultas Tarbiyah (pendidikan) tidak dianggap sama dengan lulusan IKIP (sekarang telah berubah menjadi universitas), melainkan tetap dianggap sebagai sarjana agama (S.Ag). Sama halnya dengan alumni Fakultas Syari'ah (hukum Islam); mereka tidak bisa menjadi pengacara atau notaris.

Semua masalah ini terpulang kembali pada corak dasar IAIN yang menggabungkan berbagai kepentingan, mulai dari agama, pendidikan, ideologi, sampai ilmu pengetahuan yang pada akhirnya tidak jelas alokasi keahlian yang harus diberikan.

Posisi IAIN merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Karena itu, IAIN secara keseluruhan juga tidak bisa mengisolasi diri dari perubahan-perubahan paradigma, konsep, visi dan orientasi baru pengembangan pendidikan tinggi/Perguruan Tinggi Nasional, dan bahkan internasional, seperti dirumuskan dalam Deklarasi UNESCO tentang Perguruan Tinggi pada 1998.

Sayangnya hal tersebut belum banyak direspons oleh civitas akademika IAIN Alauddin hingga sekarang.

Masalah pokok IAIN secara umum adalah: *Pertama*, IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Di antara ketiga lingkungan ini, kelihatannya peran IAIN lebih besar pada masyarakat, karena kuatnya orientasi kepada dakwah daripada pengembangan ilmu pengetahuan. *Kedua*, kurikulum IAIN belum mampu meresponi perkembangan iptek dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini disebabkan terutama karena bidang kajian agama yang merupakan spesialisasi IAIN kurang mengalami interkasi dan *reapproachment* dengan ilmu-ilmu umum, bahkan masih cenderung dikotomis. Kurikulum IAIN masih terlalu berat pada ilmu-ilmu yang bersifat normatif, sedangkan ilmu-ilmu umum yang dapat mengarahkan mahasiswa kepada cara berfikir dan pendekatan yang lebih empiris dan kontekstual nampaknya masih belum memadai.

Sesuai dengan uraian sebelumnya di atas, syari'ah merupakan suatu bidang kajian yang sangat luas, hingga akhirnya mengakibatkan terjadinya kurikulum yang sangat berat, atau berujung pada pendangkalan kemampuan peserta didik. Mahasiswa mengetahui banyak hal, tetapi tidak ada satu bidangpun di antaranya yang dikuasai secara professional. Ini tentu menuntut adanya pembidangan spesialisasi keilmuan yang lebih fisibel dan penekanan yang lebih praksis pada setiap program studi.

Berdasarkan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No. MA/Kumdi/1589/IX/1998 tertanggal 2 September 1998, menyebutkan bahwa salah

satu syarat untuk mengikuti ujian teknis hukum bagi pengacara praktik adalah "*Sarjana Hukum atau Sarjana Syari'ah*". Kenyataan bahwa semua lulusan IAIN kemudian diberi gelar Sarjana Agama (S.Ag) mengaburkan kompetensi alumni fak. Syari'ah dan mempersulit mereka ketika ingin berkiprah di dunia profesi hukum.

Mengacu pada ketentuan-ketentuan yang termaktub pada UU No. 2 Tahun 1989 tentang SPN dan PP No. 30 Tahun 1990 tentang pendidikan tinggi, maka tujuan lembaga pendidikan tinggi negeri yang mengkhususkan diri pada kajian ke-Islaman ini dirumuskan oleh RIP IAIN sebagai berikut: IAN bertujuan untuk membantu terbinanya sarjana Islam, yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, bersikap rasional dan dinamis, berpikir filosofis, berpandangan luas dan mampu bekerjasama dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional.

Dengan demikian yang menjadi obyek dan ruang lingkup studi di IAIN adalah Islam. Apakah yang dimaksud dengan Islam di sini? Studi Islam paling tidak mencakup tiga bidang pokok. Yang pertama Islam sebagai ajaran, yang terwujud dalam bentuk wahyu Ilahi yang terhimpun dalam al-Qur'an dan dalam bentuk Sunnah yakni panduan Rasulullah SAW bagi umatnya yang terhimpun dalam hadist. Dalam hal ini studi Islam bertumpu pada studi kewahyuan yang diwujudkan dalam bentuk mata kuliah sumber al-Qur'an dan al-Hadist sekaligus dengan perangkat ilmu-ilmu al-Qur'an ('ulum al-Quran) dan ilmu-ilmu Hadist ('ulum al-Hadist). Ilmu-ilmu ini, sejak

beberapa waktu yang lalu menjadi jurusan Tafsir Hadist di fak. Ushuluddin dan merupakan program studi khusus pada tingkat pascasarjana atau program S2.

Pada sisi lain Islam juga dikaji sebagai bagian dari pemikiran, sebagai bagian dari fiqh dalam arti luas, sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam al-Qur'an. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam terlihat ada lima bidang pemikiran Islam yang menonjol, yaitu: akidah-teologi ('ilm al-kalam), hukum dalam arti luas (syari'ah), filsafat (hikmah/'irfan/falsafah), akhlak-sufisme (tashawuf).

Pada tataran berikutnya Islam merupakan pengalaman dan penerapannya dalam kehidupan. Bersumberkan pada al-Qur'an dan Sunnah yang kemudian dijabarkan dalam berbagai pemikiran, ajaran Islam kemudian diamalkan dan diterapkan oleh umat Islam hingga membentuk peradaban Islam yang telah berabad-abad menyinari dunia. Islam sebagai pengalaman yang menonjol dikaji dan dikembangkan IAIN selama ini adalah aspek pendidikan (tarbiyah), dakwah dan tentu saja hukum, sedangkan aspek-aspek lain kelihatannya masih terabaikan hingga sekarang.

Untuk studi Hukum Islam, atau lebih tepat kajian syari'ah, mencakup tiga bidang, yakni studi kewahyuan sebagai sumber utama hukum Islam; studi pemikiran yang mengurai perkembangan pemikiran tentang hukum di kalangan umat Islam dan studi terapan yang mengkaji pengalaman dan implementasi serta perkembangan interaksi kaidah-kaidah tingkah-laku tersebut dengan kondisi empiris masyarakat muslim di Indonesia.

Kajian ini terkait erat dengan perdebatan di kalangan para pengkaji hukum Islam kontemporer tentang apakah syari'ah itu "substantive rules" atau metodologi. Perbincangan ini mengarahkan perhatian pada persoalan tentang apakah proses belajar-mengajar di fakultas Syari'ah lebih terfokus pada pendidikan akademis atau professional.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa studi syari'ah pada tingkat Perguruan Tinggi melingkupi baik pendidikan akademis dan juga pendidikan professional. Oleh karenanya setiap fakultas harus menentukan pilihannya, dan tidak tertutup, malah lebih baik, mengembangkan keduanya. Namun harus dipilah antara program akademis dari yang professional.

Program akademis terutama ditujukan untuk peserta didik yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, strata dua dan tiga. Konsekwensi logisnya adalah kurikulum yang ditawarkan kepada mereka juga menjadi berbeda penekanan dan metodenya. Adalah keliru memaksakan kurikulum yang padat dengan pematangan akademis bagi mereka yang lebih tertuju pada persiapan professional. Ini terlihat dari terlalu dipaksakannya setiap mahasiswa yang harus menulis skripsi yang terkadang jauh relevansinya dari dunia kerja yang akan dihadapi di kemudian hari, sedangkan suatu program kerja lapangan atau magang mungkin lebih bermanfaat.

Kompetensi minimal seorang tamatan strata satu adalah seorang tenaga ahli pelaksana, sedangkan kemampuan mengembangkan penerapan iptek dalam peran improvisasi dan inovasi proses adalah kompetensi tamatan starata dua, yang

kemudian ditingkatkan menjadi kemampuan mengembangkan dan menciptakan iptek bagi lulusan strata tiga sebagai pakar.

Kecenderungan selama ini para perencana dan pengelola program studi syari'ah berpikir terlalu ideal hingga menjejali kurikulum dengan berbagai matakuliah, sebagai bersifat pesanan dan yang lain bersifat warisan, yang memandang ideal tetapi kurang relevan dengan upaya penyiapan peserta didik dalam menghadapi dunia profesi. Ini terkait erat dengan tidak jernihnya perumusan tujuan program dan sosok lulusan yang ingin dicapai. Uraian satuan pelajaran yang diberikan, contohnya, lebih mempersiapkan mahasiswa sebagai ahli sejarah hukum yang berkutat dengan pemikiran legal-ideal masa lalu, tetapi kurang mempersiapkan mereka sebagai ahli hukum yang bergulat menghadapi problema hukum positif masa kini.

Mustahil dengan program studi formal di perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang menguasai segalanya tentang Hukum Islam. Oleh sebab itu harus diperjelas spesialisasi dan disiplin bidang studinya. Pemekaran spesialisasi, oleh karenanya penghapusan jurusan, adalah hal yang lumrah dalam dunia perguruan tinggi, hingga tidak perlu harus bertahan bahwa jurusan/program studi yang ada harus permanen.

Oleh sebab itu, salah satu cara penilikan yang harus dilakukan adalah dengan menengok sosok lulusan bagaimanakah yang telah dan ingin dihasilkan oleh program studi ini. Hal ini tentu terkait dengan kondisi dan proyeksi lapangan kerja yang ada dan yang berkembang.

Untuk itu Fakultas Syari'ah IAIN bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi sarjana yang memiliki kemampuan akademik dan professional yang menguasai, menerapkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan tarap kesejahteraan masyarakat dan memperkaya kebudayaan dalam bidang kesyari'ahan. Para alumni fakultas syari'ah dipersiapkan untuk mengembang profesi yang pengetahuan dan keterampilan dalam disiplin ilmu kesyari'ahannya merupakan persyaratan dasar bidang keahliannya.

Sejak awal berbdirinya, fak. Syari'ah ditujukan terutama untuk menyediakan tenaga ahli dalam bidang birokrasi pemerintahan yang menguasai Hukum Islam yang memang sedang sangat dibutuhkan, terutama untuk mengisi jabatan hakim di jajaran peradilan agama dan jabatan lain dalam lingkup Departemen Agama.

Oleh karenanya, visi yang paling fundamental barangkali adalah kejernihan memandang bahwa fakultas Syari'ah khususnya dan IAIN umumnya pada dasarnya adalah lembaga pendidikan tinggi, tegasnya lembaga ilmiah yang harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ilmiah dan akademis. Memandang lembaga ini lebih sebagai lembaga dakwah, dalam arti sempit, apalagi sebagai institusi birokratis yang kaku, hanya akan mempersulit pengembangan lembaga itu sendiri, terlebih dalam era global dewasa ini.

Bila kita memperbandingkan tujuan pendidikan hukum secara umum, maka program studi Hukum Islam di IAIN seyogyanya diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi sarjana yang: 1. mengenal hukum Islam secara menyeluruh dan

menguasai bagian hukum Islam yang menjadi bidang konsentrasi studinya, 2. mengenal hukum positif di Indonesia secara umum dan menguasai bagian hukum positif di Indonesia yang menjadi bidang konsentrasinya, 3. menguasai landasan ilmiah dan dasar-dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum, 4. mengenal dan peka terhadap masalah-masalah keadilan dan kemasyarakatan, 5. memiliki kemampuan menganalisa masalah-masalah hukum dan masyarakat, dan, 6. mempunyai kemampuan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan problema kemasyarakatan dengan adil dan bijaksana serta berdasar pada prinsip-prinsip syari'ah yang telah ada.

Untuk itu kita mau atau tidak, kita setuju atau tidak dengan terpaksa kita harus bersiap dan mempersiapkan IAIN secara umum dan fakultas Syari'ah secara khusus dalam menghadapi perubahan menjadi universitas. Mengingat beragamnya kondisi internal yang kita miliki di daerah ini dan mencermati luas dan beragamnya situasi lingkungan yang meliputinya, mutlak diperlukan adanya otonomisasi dan diversifikasi studi Hukum Islam, hingga lebih relevan dengan kondisi obyektif masa kini dan proyeksi masa depan masing-masing. Hal yang barangkali perlu dikembangkan adalah jaringan antara berbagai pusat studi dan berbagai lembaga sejenis, terkait dan pendukung lainnya yang terkait.

Semua ini menuntut adanya suatu perencanaan yang terarah dan upaya konkrit yang lebih komprehensif dan berkesinambungan untuk memperbaiki struktur dan meningkatkan kultur. Dari segi struktur patut dilakukan suatu kajian ulang hingga bisa menawarkan organisasi yang lebih fisibel bagi tatanan kejurusan, program studi,

kurikulum serta variable proses dan piranti pendukung lainnya. Status Fakultas dan kedudukan alumni Syari'ah dalam konstelasi institusi pendidikan tinggi hukum di negeri ini harus ditingkatkan. Seleksi dan promosi tenaga pengajar harus lebih didasarkan atas meritokrasi dan profesi. Perpustakaan harus menjadi prioritas untuk dilengkapi kebutuhannya secara modern.

Pembaruan apapun dari segi struktur tidak akan berhasil banyak, malah bisa menjadi bumerang, jika tidak dilandasi oleh perubahan kultur. Terbinanya sikap ilmiah yang mantap serta budaya akademis yang baik di kalangan sivitas akademika menjadi mutlak diperlukan. Pandangan bahwa tugas seorang dosen hanya ketika bertatap muka di kelas, tanpa mengindahkan dan mengarahkan aktivitas akademis berstruktur dan kegiatan ilmiah mandiri, sebagaimana masih umum dipraktikkan selama ini, harus segera diubah. Gabungan dari perbaikan struktur dan cultural inilah yang akan mengantarkan studi hukum Islam di IAIN khususnya dan perguruan tinggi umumnya ke masa depan yang lebih cerah dan peran yang lebih aktif-konstruktif bukan saja bagi kemaslahatan umat Islam tetapi demi kesejahteraan bangsa Indonesia seluruhnya, bahkan bagi kemajuan kemanusiaan bangsa dan negara.

Masih terlalu jauh dan banyak persoalan yang menghadang dihadapan kita untuk membawa IAIN Alauddin menjadi universitas dan menempatkan fakultas Syari'ah sebagai salah satu fakultas dengan bidang kajian keilmuan adalah ilmu hukum secara luas (umum dan khusus).

Hanya dengan memperbaiki dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang menghadang tersebut niscaya kita dapat mewujudkan harapan tersebut. Yang pasti

kita setuju atau tidak kita mau terima atau tidak ke depan IAIN Alauddin haruslah menjadi universitas termasuk fakultas Syari'ah menjadi fakultas umum. Kondisi lingkungan dan pengaruh globalisasi memaksa kita untuk menerima kenyataan tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita memulai sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan diri untuk menjadi universtas?

4.4. Beberapa Catatan

Ada pesan bijak³ yang berbunyi "*menyeragamkan sesuatu yang semestinya berbeda sama tidak adilnya dengan membedakan sesuatu yang semestinya sama*". Pesan ini sangat relevan untuk dihayati dalam konteks bangsa Indonesia yang tengah berusaha mengingat-ingat lagi bagaimana cara yang benar dalam menyikapi kenyataan pluralisme di negeri sendiri.

Mungkin juga menjadi nafas dalam wacana hukum progresif pada umumnya dan khususnya Hukum Islam, mulai dari pemahaman sistem pendidikan hukum nasional hingga pergulatan pemberlakuan bentuk-bentuk formalitas hukum Islam di Indonesia. Baik pada tataran politik praktis maupun kultural, karena justru dengan suasana seperti ini (*pluralisme dan demokrasi*) Hukum Islam akan mendapat tempat yang lebih baik dalam mengaktualisasikan dirinya.

Pekerjaan rumah besar para sarjana hukum (baik sarjana hukum maupun sarjana hukum Islam/Syari'ah) adalah ikut berpartisipasi dan memikirkan

³ M. Nuzul W, *Syari'ah dan Pendidikannya di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Hukum Jentera, Edisi Khusus, 2003) h. 57-85.

kontribusunya terhadap cita-cita pembentukan sistem hukum nasional yang terpadu, bukan sibuk dengan hal-hal lain, seperti sibuk menjelaskan bahwa hukum syari'ah adalah hukum moral belaka, terhadap peradaban modern.

Pada sisi lain sebagian ahli Hukum Islam juga justru sibuk mengharamkan ini itu-lah terhadap hukum positif kita dengan klaim warisan kolonial, sekulerlah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ada yang terlewat atau tidak tuntas dalam sistem proses pendidikan hukum dan syari'ah di Indonesia.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pendidikan agama termasuk syari'ah di Indonesia sebelum masa penjajahan telah eksis dan berjalan secara independen melalui sistem pendidikan pesantren, namun secara institusional dapat dikatakan masih lemah, terlebih jika dibandingkan dengan sistem atau metodologi pendidikan barat yang datang kemudian.

Namun secara keseluruhan pendidikan pesantren (klasik) di Indonesia termasuk cukup tangguh dan dapat bertahan hingga sekarang dan secara historis lembaga pendidikan pesantren jugalah yang pada gilirannya menjadi benih cikal bakal atau paling tidak sebagai stimulan sekaligus provokator dirancangnya sistem pendidikan hukum Islam (syari'ah) modern yang dapat lebih meningkatkan kualitas intelektualnya sebagaimana tuntutan globalisasi.

Sekedar perbandingan bahwa di wilayah-wilayah atau negara yang mayoritas muslim seperti Turki dan Mesir sistem lembaga pendidikan agamanya kebanyakan lenyap setelah tergusur oleh ekspansi pendidikan umum, atau setidaknya telah mengalami transformasi atau dikonfersi menjadi lembaga pendidikan umum.

Lenyapnya sistem lembaga pendidikan agama di dua negara tersebut adalah sebagai imbas dari globalisasi dan upaya modernisasi yang memaksanya untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan secara besar-besaran. Di Turki pada 1924 Mustafa Kemal Ataturk menghapuskan sistem madrasah dan mengubahnya menjadi sekolah-sekolah umum, yang sebelumnya pada 1846 oleh Sultan Abdul Majid telah melakukan pemisahan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Perlakuan tega ini juga dialami oleh lembaga pendidikan agama di Mesir terlebih sejak Jaman Khedive Ismail yang pada 1868 mengeluarkan ketetapan untuk mengintergrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan umum walau tidak berhasil.

Adapun puncak tamatnya lembaga pendidikan agama (madrasah) di sana terjadi pada 1961 dimana pemerintah Gamal Abdel Nasser menghapus sistem madrasah dengan alasan integrasi dan nasionalisasi. Dari dua contoh ini kiranya cukup dapat menggambarkan bahwa lembaga pendidikan Islam cukup rentan terhadap gelombang modernisasi dan globalisasi.

Untuk konteks Indonesia lembaga pendidikan agama tradisional, pesantren atau suroh dapat bertahan hingga sekarang karena karakter political will-nya berbeda dengan dua negara di atas serta dapat menyiasatinya dengan cukup baik. Namun perlu diketahui bahwa pada awalnya lembaga pesantren (khususnya di pulau Jawa) cukup dingin dalam merespons modernisasi dan gelombang ekspansi pendidikan umum (barat). Namun karena desakannya cukup kuat disamping kondisi metodologi pengajarannya yang memang sudah kurang memadai lagi maka demi kelangsungan tradisi dan keperluan pengembangan sistem pendidikan, akhirnya pesantren-pesantren

bersedia mengikuti tuntutan-tuntutan perubahan zaman meski kenyataannya masih ada yang tetap bertahan pada kondisi aslinya.

Bahkan dalam perkembangan selanjutnya kini cukup banyak Perguruan Tinggi Islam telah didirikan tanpa berbasis pesantren (dilingkungannya). Adapun cara yang umumnya ditempuh dalam merespons ekspansi sistem pendidikan umum ada dua, yakni dengan merevisi kurikulumnya dan memasukkan lebih banyak mata pelajaran umum atau bahkan keterampilan umum.

Selain itu, dengan cara membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum yang digalakkan pemerintah yang dalam hal ini jenjang-jenjang pendidikan formal (sekolah-sekolah). Dengan cara ini maka sistem pendidikan umum dapat berjalan dengan baik tanpa melikuidasi lembaga-lembaga pendidikan agama tradisional (pesantren) yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian pesantren-pesantren di Indonesia dewasa ini walaupun identik dengan konservasi tradisi namun pada hakekatnya juga telah berevolusi ke arah sistem pendidikan barat.

Fakultas Syari'ah sebagai jawaban atas tuntutan modernisasi sistem pendidikan Hukum Islam merupakan bagian dari kesatuan lembaga pendidikan agama Islam yang telah lama dicita-cita khususnya oleh masyarakat muslim Indonesia sejak jaman pra kemerdekaan. Di awal tahun 40-an telah diupayakan berdirinya sekolah-sekolah tinggi Islam namun karena suasana kolonial (Belanda yang kemudian di susul Jepang) masih cukup kuat maka perjalanan pelaksanaannya selalu terlambat dan sekalipun berjalan tidak bertahan lama, salah satu contohnya

adalah Sekolah Islam Tinggi (SIT) yang didirikan oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) di Padang yang hanya berjalan kurang lebih dua tahun, yaitu dari 1940-1942.

Baru kemudian 8 Juli 1945 di Jakarta dibentuklah Sekolah Tinggi Islam (STI) diantara tokoh-tokoh yang berjasa dalam membidaninya adalah Dr. Moh. Hatta, K.H. Mas Mansur, K.H. A. Kahar Mudzakkir, K.H. Fathurrahman Kafrawi dan K.H. Farid Ma'ruf. Namun keberadaannya di Jakarta tidaklah lama karena pada 1946 Sekolah Tinggi ini ikut pindah ke Yogyakarta mengikuti kepindahan Pusat Pemerintahan RI.

Sejak 22 Maret 1948 berganti nama dengan Universitas Islam Indonesia (UII) dengan penambahan fakultas-fakultas baru sehingga UII memiliki empat buah fakultas yaitu: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pendidikan. Pada 1950 Fakultas Agama UII dinegerikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Islam Negeri) yang didalamnya terdapat jurusan Qadha (peradilan) dimana pada jurusan ini sudah mempelajari mata kuliah Pengantar Hukum, Asas-asas Hukum Publik dan Privat. Setelah berdirinya PTAIN kemudian di Jakarta berdiri ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) pada 1 Juni 1957 yang kemudian berubah menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri), dan terakhir pada tahun 2002 nama berikut statusnya berubah menjadi UIN (Universitas Islam Negeri).

Ketika IAIN Jakarta baru didirikan, Fakultas Syari'ah belum dibuka namun dengan berbagai pemikiran dan pertimbangan akhirnya pada 1967 Fakultas Syari'ah dibuka dan mulai berjalan pada tahun 1968. Sejak berdirinya Fakultas Syari'ah secara terpisah kajian-kajian Islam mengenai disiplin ilmu hukumnya menjadi lebih fokus dan terus dikembangkan dengan berbagai pembaruan sesuai dengan perkembangan

dan kebutuhan lokal maupun globalisasi. Bentuk-bentuk pembaruannya mulai dari mempelajari sebagian dari materi-materi hukum umum (positif) sebagaimana yang dipelajari di Fakultas Hukum, pendidikan lanjutan (seperti pendidikan calon hakim agama), dan pelatihan kepengacaraan.

Pada hakikatnya dengan didirikannya Fakultas Syari'ah merupakan upaya perwujudan salah satu proses mata rantai dari yang dicita-citakan syari'ah itu sendiri, yaitu kemaslahatan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat yang dalam kapasitas spesialisasinya bertugas menciptakan para sarjana yang dengan modernisasi keahliannya dalam bidang hukum syari'ah akan mampu menerjemahkan serta menerapkan prinsip-prinsip ajaran agama (syari'ah) ke dalam format konkret yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan masing-masing jaman dan tempatnya. Dengan kata lain para sarjana syari'ah diharapkan akan berfungsi sebagai pengawal perubahan atau dinamika berbagai aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan sebagainya melalui berbagai kiprah praksisnya. Mulai dari menjadi hakim, konsultan, dosen, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga dalam bentuk peran tradisional sekalipun atau berbagai bentuk pekerjaan dan profesi lainnya.

Namun hingga saat ini Fakultas Syari'ah dapat dikatakan belum mampu mencapai target maksimalnya secara mapan. Hal ini disebabkan tingginya dinamika perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik yang berskala lokal maupun global yang kesemuanya itu pada gilirannya juga akan berimplikasi pada perkembangan fiqh sebagaimana yang menjadi *core studi* nya Fakultas Syari'ah.

Sehingga amat wajar jika Fakultas Syari'ah cukup keropotan merespons perkembangan tersebut mengingat peran konkrit yang ditunggupun bukan lagi proyek jangka panjang melainkan telah mendesak.

Kondisi seperti ini secara umum sebenarnya telah diwanti-wanti sebelumnya oleh pakar hukum dari Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo di mana beliau ikut menjelaskan bahwa pembangunan itu bersifat imperatif terhadap hukum, dalam arti bahwa baik secara langsung maupun tidak, hukum diminta peran dan bantuannya untuk mengantarkan masyarakat ke arah pembangunan serta menampun dan mengatasi segala bentuk akibat yang akan ditimbulkan dari pembangunan tersebut. Jadi dalam hal ini baik para sarjana hukum maupun sarjana syari'ah kurang lebih mengemban tugas dan tanggung jawab yang sama.

Nampaknya jika dibandingkan dengan tanggung jawab (berdasarkan kompetensinya) yang harus dipikul oleh para sarjana hukum maka tanggung jawab yang akan dipikul oleh para sarjana syari'ah (SHI/Sarjana Hukum Islam) cenderung lebih berat, karena sebagaimana tugasnya bahwa calon sarjana syari'ah tidak hanya harus menguasai prinsip-prinsip dasar syari'ah saja melainkan harus mampu mentransfer ke dalam formulasi fiqh yang sesuai dengan berbagai aspek *de facto* dan *de jure* dari realitas yang berjalan di Indonesia. Sedangkan beban akademik bagi sarjana hukum konvensional cenderung lebih dititik beratkan dalam masalah *de facto* saja karena secara *de jure*nya tidak begitu bermasalah karena yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum konvensional itu sendiri sedangkan bagi sarjana

syari'ah setelah mengkaji realitas sosial kemudian dilanjutkan dengan mengkaji realita hukum yang berlaku baru setelah itu baru digarap dalam perspektif syari'ah.

Dengan kata lain sarjana syari'ah akan mempunyai peran lebih konkret jika ia juga paham akan kondisi rimba hukum yang sesungguhnya berlaku saat ini yang nota bene hukum barat (*kontinental plus anglo saxon*), dan sebaliknya jika mahasiswa fakultas syari'ah tidak memahami hukum positif maka setidaknya akan cenderung lebih sulit untuk mengetahui mana yang sudah sesuai dengan prinsip syari'ah mana yang masih bertentangan, mana yang masih bisa dinego dan mana yang tidak.

Dari pemikiran ini maka kurikulum Fakultas Syari'ah harus lebih difokuskan pada masalah hukum, dalam pengertian harus lebih ditekankan pada kajian materi-materi hukum positif terapan dalam perspektif syari'ah dibanding mendalami materi-materi lain yang sifatnya teknis atau bahkan lebih tepat dikaji diluar fakultas hukum atau syari'ah, karena masih banyak materi lain yang jika berdasarkan aspek kompetensi jauh lebih penting disamping agar juga tidak membebani mahasiswa dengan total SKS yang terlalu banyak.

Dari sini mungkin akan timbul pertanyaan, apakah dengan mengguritanya kajian mahasiswa fakultas syari'ah justru akan membuat fokus kajian intinya (Syari'ah dan fiqh) akan ternodai karena masuknya disiplin ilmu-ilmu *profane mundane* yang notabene berasal dari kultur barat? Menurut penulis jawaban "ya" hanya akan keluar dari orang-orang yang menganggap kajian syari'ah dan fiqh sebagai benda-benda museum yang hanya dijadikan ajang nostalgia peradaban

muslim masa lalu, atau paling tidak hanya sebagai pengukuhan identitas ke-Islaman masyarakat Indonesia.

Paradigma berpikir seperti ini justru keliru karena hakekat syari'ah adalah hidayat (pedoman) bukan hikayat (dongen). Dengan statusnya sebagai hidayah inilah maka pengembangan kajiannya menjadi suatu keharusan kapan saja dan di mana saja dengan mengikuti dinamika hukum alam yang juga merupakan bagian dari sunnatullah. Selain itu bukankah ayat paling pertama yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an berbunyi Iqra yang semakna dengan read, learn and think.

Dari pemikiran ini kiranya dapat terbaca bahwa pada hakekatnya orientasi dari pendidikan dan kajian Hukum Islam adalah pemberlakuannya atau pelaksanaannya secara nyata dan bukan sekedar konservasi tradisi pengajarannya dalam rangka menegaskan identitas ke-Islaman suatu lembaga pendidikan. Adapun tahap-tahap yang mau tidak mau harus ditempuh dalam proses pembumian prinsip-prinsip syari'ah di Indonesia adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, yaitu dengan memahami juga hukum positif Indonesia.

Maka dengan dipelajarinya ilmu-ilmu hukum non syari'ah di fakultas syari'ah bukan berarti telah terjadi perubahan orientasi dari hukum islam ke hukum barat, akan tetapi perubahan orientasi yang terjadi adalah dari orientasi yang bersifat "formalitas konservasi identitas" ke arah aplikasi kongret prinsip-prinsip syari'ah dalam format ius constitutum khas Indonesia.

Di era modernisasi pendidikan pada umumnya, khususnya dalam dunia pendidikan tinggi hukum maka sangat tergantung dengan kehendak yang

sesungguhnya terbentuk di balik kurikulum yang dirumuskan. Semakin tetap konsep orientasi kurikulum yang diaplikasikan maka semakin mantap pula target yang dicita-citakan. Semakin keliru konsep orientasi kurikulum dari yang diinginkan semakin jauh pula target pendidikan hukum yang dicita-citakan.

Jika di atas telah disinggung mengenai orientasi praksis berikutnya yang dibahas disini adalah orientasi spesialisasi, yakni dalam kaitannya dengan pemetaan spesialisasi dalam dunia akademis. Syari'ah sebagaimana telah terasosiasikan dengan wacana hukum, maka fakultas syari'ah pun dalam dunia pendidikan tinggi Islam diposisikan sebagai institusi yang berkompeten untuk melaksanakannya. Intinya para lulusan fakultas syari'ah ini kelak akan menjadi ahli atau pakar hukum yang berwawasan syari'ah dengan berbagai spesialisasinya.

Adapun jurusan yang ada di fakultas syari'ah secara umum sekarang ini seperti di UIN Syarif Hidayutullah Jakarta adalah sebagai berikut:

- A. Al-ahwal al-syakhshiyah (Hukum Keluarga), dengan pengkhususan program studi:
 - 1. Peradilan Agama.
 - 2. Adminstrasi Perkawinan.
- B. Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Pemerintahan), dengan pengkhususan program studi:
 - 1. Jinayah (Ilmu Hukum Pidana).
 - 2. Siyasah Syari'ah (HTN dan Ilmu Perundang-undangan).
- C. Perbandingan Mazhab dan Hukum, dengan pengkhususan program studi:

1. Perbandingan Mazhab Fiqh.

2. Perbandingan Hukum.

D. Muamalah (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi) dengan pengkhususan program studi:

1. Perbankan Islam.

2. Takaful (asuransi).

Dari penjurusan-penjurusan berikut masing-masing kurikulumnya meskipun masih ada kekurangan-kekurangannya telah cukup mengarahkan para mahasiswanya menjadi ahli hukum berwawasan syari'ah berdasarkan bidangnya masing-masing, yaitu ahli hukum keluarga atau konsultan hukum dalam konteks peradilan agama, ahli hukum pidana, ahli hukum tata negara, ahli perbandingan hukum (comparative law) dan ahli hukum bisnis.

Pada dasarnya kurikulum pada semua jurusan di fakultas syari'ah harus senantiasa terus diperbaharui dan disempurnakan. Apa lagi saat ini lulusan fakultas syari'ah mendapat penghargaan baru yang lebih merupakan tanggung jawab, yaitu boleh menjadi advokat dengan menempuh proses yang sama dengan para lulusan dari fakultas hukum. Namun dalam pembahasan mengenai kurikulum-kurikulum di fakultas syari'ah yang mungkin perlu mendapat perhatian khusus adalah pada jurusan Muamalah, karena memang jurusan inilah yang belakang paling kebanjiran wacana dan beban akademik sehingga tingkat permasalahan dalam penanganan kurikulumnya pun dapat dikatakan lebih kompleks dibanding jurusan-jurusan lainnya.

Saat ini pada jurusan lain selain Muamalat, orientasi kurikulum ke arah ahli hukum (Islam) jauh lebih kuat dibandingkan dengan orientasi kurikulum di jurusan Muamalat. Ini dapat dilihat dari porsi mata kuliah non syari'ah (fiqh) yang disisihkan untuk dipelajari dari yang berupa kajian keislaman (hukum) seperti Ulumul Qur'an, Ulumul Hadits, Tafsir Ahkam, Hadits Ahkam, Ushulu Fiqh. Tarikh Tasyri', Masa'ilul Fiqhiyah, dan berbagai ilmu fiqh lainnya sesuai jurusannya masing-masing.

Sebagai perbandingannya adalah sebagai berikut:

a. Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah:

1. Program Studi Administrasi Perkawinan: Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, Metode Penelitian Hukum, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Internasional, Ilmu Perundang-undangan, Perundang-undangan Islam di Indonesia, Hukum Perdata Islam di Indonesia (I dan II), Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Agraria, Praktikum KUA, Praktikum PA, dan Praktikum Advokat.
2. Program Studi Peradilan Agama: Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, Metode Penelitian Hukum, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata Islam di Indonesia (I dan II), Pengantar Perbandingan Hukum, Praktikum KUA, Praktikum PA, Praktikum Advokat.

b. Jurusan Jinayah Siyasa:

1. Program Studi Siyasah Syari'ah: Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik/Pemerintahan, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Ilmu Perundang-undangan, Perbandingan Hukum Tata Negara, Sistem Politik di Indonesia, Sistem Politik di Negara Barat, Sistem Politik di Negara Muslim, Politik Islam di Indonesia (I dan II), Politik Hukum Islam di Indonesia, Praktikum Mekanisme Pengambilan Putusan Politik.
2. Program Studi Jinayah: Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, Metode Penelitian Hukum, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi (I dan II), Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Pelaksanaan Hukum Pidana Islam di Dunia Islam, Praktikum PA, PN. LBH.

c. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum

1. Program Studi Perbandingan Mazhab Fiqh: Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, Metodologi Perbandingan Hukum, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Ilmu Perundang-undangan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (I dan II), Praktikum PA, Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Perbandingan Hukum Perdata.
2. Program Studi Perbandingan Hukum: Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, Metodologi Penelitian Hukum, Metodologi Perbandingan Hukum, Hukum Internasional, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata

Negara, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Filsafat Hukum, Ilmu Perundang-undangan, Perbandingan Hukum Internasional, Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Pidana, Perbandingan Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum Agraria, Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan, Praktikum PA, Praktikum PN, Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama.

d. Jurusan Muamalah:

1. Program Studi Perbankan Islam: Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Dagang, Hukum Perbankan Syari'ah, Hukum Perikatan, Hukum Perikatan Islam, Hukum Pajak, Peradilan Agama di Indonesia.
2. Program Studi Takaful: Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Asuransi, Hukum Dagang, Hukum Perikatan, Hukum Perikatan Islam, Hukum Pajak, Peradilan Agama di Indonesia.

Dari perbandingan mengenai porsi mata kuliah non syari'ah yang dialokasikan pada masing-masing jurusan terlihat jurusan muamalah yang paling sedikit mengalokasikannya, dibandingkan dengan jurusan-jurusan lainnya. Padahal sebagai representasi fakultas syari'ah dalam bidang hukum bisnis, jurusan muamalah lebih relevan jika porsi mata kuliah non syari'ahnya tetap dialokasikan pada disiplin ilmu hukum lainnya yaitu materi-materi hukum positif.

Rumusan materi atau mata kuliah yang ditetapkan dalam program studi pada jurusan muamalah seharusnya dirancang untuk mengarahkan mahasiswanya kepada spesialisasi keahlian bidang-bidang tertentu dengan tetap berada pada rel utamanya yaitu kajian aspek hukum dengan pendalaman perspektif syari'ah. Dalam pengertian lain, kerangka kurikulum pada jurusan muamalah harus tetap pada pendalaman aspek-aspek hukum bisnis saja dan tidak perlu terlalu meluas sampai ke materi-materi lain di luar hukum, karena masih banyak materi-materi hukum yang belum diberikan yang kemudian harus dikaji dalam perspektif syari'ah. Pada jurusan muamalah (hukum tentang kegiatan ekonomi) materi-materi yang perlu dikaji lebih dalam sebagai Mata Kuliah Keahlian jurusan (MKKJ) sebelum masuk ke tahap pengkajian Mata Kuliah Keahlian Progran Studi (MKKPS) di antaranya: Hukum Perusahaan, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan, Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi, Hukum Surat-surat Berharga, Hak Milik Intelektual, Hukum tentang Investasi, Pasar Modal, dan Penelusuran Literatur dan Penulisan Hukum.

Selain itu materi yang juga sangat penting untuk dimasukkan sebagai materi atau mata kuliah wajib fakultas syari'ah, yaitu yang umumnya di lingkungan fakultas hukum disebut dengan PLKH (pendidikan lanjutan Kemahiran Hukum), di mana materinya mencakup Perancangan Peraturan Negara, Pilihan Penyelesaian Sengketa Bisnis, Penyusunan Kontrak Dagang, yang padanannya dalam materi ilmu hukum Islam masing-masing adalah Tasyri'al qanuny, manhaj fi sulh wa tahkim, dan tasyri'al al uqud. Dari sekian banyak materi ini jika dibiarkan lolos dari pembedahan kajian syari'ahnya justru akan membuat perkembangan hukum bisnis (Islam) di

Indonesia akan tertinggal atau stagnan, selain itu walau bagaimanapun pemegang tanggung jawab moral atas kondisi perkembangan Hukum Islam nasional tidak lain adalah fakultas syari'ah yang notabene sebagai pusat institusi formal pendidikan hukum Islam (di Indonesia). Dan jika kondisi seperti ini jika tidak segera diatasi akan membuat misi dari cita-cita pembentukan hukum nasional berjalan tidak maksimal di mana jelas-jelas materi Hukum Islam berikutn perkembangannya merupakan salah satu bahan bakunya.

Pada pertengan 90-an ke belakang jurusan-jurusan yang ada di fakultas syari'ah IAIN Jakarta (sekarang Universitas Islam Negeri/UIN) adalah:

1. Perbandingan Mashab dan Hukum,
2. Peradilan Agama, dan
3. Perdata dan Pidana Islam (muamalah wa jinayah).

Pada jurusan muamalah jinayah meskipun sebenarnya belum mengarah kepada spesialisasi yang sesungguhnya (berhubung saat itu antara Muamalah dan Jinayah masih disatukan dalam satu jurusan) maka berdasarkan kurikulum saat itu orientasi ke arah keahlian hukumnya jauh lebih kental dibandingkan kurikulum sesudahnya.

Dari 80-an mata kuliah terdapat sembilan belas (19) materi/mata kuliah Hukum Konvensional yang harus dipelajari, yaitu: Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI) I, PIH/PTHI II, Filsafat Hukum, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata I, Hukum Perdata II, Hukum Pidana I, Hukum Pidana II, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana,

Hukum Perdata Internasional, Hukum Adat, Hukum Dagang, Hukum Agraria, Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Praktikum Acara Peradilan Agama, dan Metodologi Riset Hukum.

Dengan orientasi kurikulum seperti ini sangat mendukung para calon sarjana syari'ah untuk tetap konsisten dan fokus pada keahlian utamanya yaitu dibidang hukum syari'ah dan tidak mengarah pada keahlian lain di luar hukum seperti, bankir atau pengusaha yang umumnya berada dalam wilayah kompetensi fakultas ekonomi.

Namun belakang ini kiranya orientasi kurikulum jurusan muamalah cenderung (sedang) mengalami pergeseran yang semula diproyeksikan menjadi faqih atau *syari'ah lawyer* atau ahli hukum yang berwawasan syari'ah menjadi ke arah *moslem entrepreneur* (untuk tidak mengatakan employer). Hal ini dinataranya disebabkan kompetensi akademik di lingkungan IAIN untuk mengkaji perkembangan industri bisnis modern berikut menciptakan SDM nya hanya mungkin dan relevan dilaksanakan oleh fakultas syari'ah yang memang menjadikan ekonomi sebagai objek kajian fiqihnya.

Selain itu juga karena pengaruh atau konsekuensi akademis dari pembukaan program studi-program studi kekhususan itu sendiri yang memang menjadi tuntutan fakultas syari'ah, yaitu dibukanya Program Studi Perbankan Islam dan Program Studi Takaful (Asuransi Islam). Sebagai konsekuensinya, maka di jurusan muamalah saat ini mata kuliahnya lebih didominasi oleh mata kuliah-mata kuliah yang umumnya dipeleajari bukan di fakultas hukum melainkan di fakultas ekonomi, seperti: Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Manajemen Keuangan, Matematika dan Statistik

Ekonomi, Pengantar Akuntansi, dan Akuntansi Biaya, sehingga porsi materi hukumnya yang seharusnya lebih banyak menjadi berkurang.

Intinya jika kedua kurikulum tersebut dibandingkan maka kurikulum yang terdahulu lebih berorientasi menciptakan ahli hukum dibandingkan dengan kurikulum sesudahnya yang cenderung berorientasi menciptakan praktisi bank atau asuransi syari'ah. Meskipun demikian, selain hal di atas lebih merupakan suatu proses dalam upaya merespons tuntutan perkembangan, komitmen pembaruan dan orientasi modernisasi fakultas syari'ah sangat patut dibanggakan, karena hingga saat ini proses-prose pembenahan di fakultas syari'ah seperti melalui pengkajian isu-isu mutakhir dan pembaruan kurikulum dapat dikatakan cukup *mobile* dan dinamis. Salah satu contohnya adalah dengan menambah beberapa mata kuliah seperti: Hukum Pajak, Sosiologi Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan serta kajian-kajian pengembangan wawasan hukum lainnya.

Saat ini pun di fakultas syari'ah di UIN Jakarta tengah menggodok kurikulum baru sebagai respons atas modernisasi pendidikan syari'ah. Selain itu para pengajarnya pun dipegang oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya seperti dengan merekrut dan mendatangkan tenaga pengajar dari fakultas-fakultas hukum dan para praktisi, seperti pengacara, dan mantan-mantan hakim.

Seiring dengan perkembangan dan pembaruan orientasi fakultas syari'ah dalam hal pembumih nilai-nilai syari'ah yang di antaranya melalui pemahaman terhadap materi-materi hukum positif membuat para lulusannya juga sedikit banyak tidak lagi hanya beredar di dunia profesi "*per-ustad-an*" saja, akan tetapi kini telah

menjelma sebagai tenaga intelektual, profesional atau yang lainnya dan layaknya profesi "*modern urban society*". Dalam hal ini perlu kiranya dikutip komentar Rektor UIN saat ini, Prof. Azyumardi Azra, pada buku IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia (UIN Press) menyatakan:

"Sampai 1975-an, ijazah IAIN hanya berlaku di Departemen Agama, sementara departemen-departemen lain cenderung menolaknya. Pada dua dasawarsa terakhir, Depdiknas bukan satu-satunya lapangan yang berhasil ditembus para alumni IAIN, departemen lain mulai "tidak sungkan" menerima mereka. Misalnya di Depdagri, Departemen Komunikasi dan Informasi, Depkundang dan HAM, Kejaksaan dan lain-lain. Para alumni IAIN juga memiliki prestasi yang membanggakan sebagai politisi, aktivis LSM, pengusaha dan lain-lain, di samping tetap banyak di antara mereka setia menekuni peran tradisionalnya.... Mobilitas "anak-anak" IAIN terlihat pula pada lembaga-lembaga penelitian ilmiah dan pengembangan masyarakat baik milik pemerintah dan apalagi swasta. Semua perkembangan ini, tidak bisa lain, kecuali mengangkat harkat IAIN menjadi sebuah Perguruan Tinggi yang Intellectual Prestigious".

Komentar di atas meskipun tidak dikhususkan pada lulusan fakultas syari'ah saja, justru banyak profesi dan instansi lainnya yang belum disebutkan yang kini juga telah menjadi lahan pekerjaan bagi para lulusan syari'ah, seperti bank, kantor hukum, konsultan bisnis, aktivis LSM hukum, hakim, pers, kantor pajak, pialang, posisi HRD di berbagai perusahaan, dan tempat serta posisi lainnya yang belum terdekasi dihuni oleh lulusan syari'ah.

Di samping posisi-posisi yang hingga kini masih hanya dipegang oleh lulusan syari'ah seperti Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau lebih populer dengan istilah penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini jelas menunjukkan bahwa

kiprah yang kini ditekuni para lulusan syari'ah tidak lain berbasiskan kompetensinya yang sudah berkembang sedemikian rupa sehingga lulusan syari'ah (di luar posisi-posisi tertentu yang memang memerlukan pendidikan lanjutan seperti notaris atau akuntan) kurang lebih mempunyai peluang yang sama dengan sarjana-sarjana lainnya seperti sarjana hukum, sarjana ekonomi atau sarjana fisip.

Dalam polemik ini nampaknya akan sulit diterima bahwa lulusan fakultas syari'ah berhak menjadi advokat di lingkungan peradilan umum (apalagi di Peradilan Militer) jika tolok ukurnya berbasiskan standar kompetensi akademis fakultas hukum. Demikian pula sebaliknya akan sulit diterima jika para lulusan fakultas hukum berhak untuk menjadi advokat di lingkungan peradilan agama atau mahkamah syari'ah jika standar akademik hukum syari'ah nya diukur berdasarkan standar fakultas syari'ah.

Hal lain yang membuat polemik ini menjadi rada unik yaitu adanya ketidakpercayaan dari kalangan yang keberatan jika lulusan syari'ah boleh menjadi advokat terhadap ketentuan mengenai mekanisme proses seleksi atau ujian untuk menjadi advokat yang notabene dirancang oleh kalangan hukum sendiri, yaitu SEMA No. 1 Tahun 1998 di mana standar persyaratan kelulusan ujian menurut SEMA ini baik bagi pemohon lulusan fakultas hukum maupun lulusan fakultas syari'ah keduanya terlebih dahulu harus mengatasi sembilan mata ujian yang sama, bila lulus bagi yang berijazah fakultas hukum boleh menjadi advokat di semua lingkungan Peradilan akan tetapi bagi yang lulus dengan ijazah fakultas syari'ah hanya bisa menjadi advokat terbatas di lingkungan Peradilan Agama saja.

Mengingat akhirnya lulusan fakultas syari'ah boleh menjadi advokat melalui disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 maka yang perlu dipikirkan sekarang adalah langkah atau upaya-upaya apa yang harus diadakan dalam rangka penyesuaian atau penyeimbangan antara realita standar akademis dengan wewenang yang telah diberikan undang-undang. Hal inilah yang kini dijadikan acuan utama dalam rangka pembenahan atau pembaruan kurikulum terbarunya yang kini sedang digodok.

Sebagaimana telah menjadi cita-cita dan komitmen negara khususnya pasca era reformasi, bahwa: salah satu kehendak bangsa ini adalah ingin memiliki dan menata hukum nasional secara terpadu dengan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif. Dari arah kebijakan tersebut dapat dijadikan momentum yang paling baik untuk memikirkan apa yang dapat kita sumbangkan bagi kepentingan pembentukan hukum nasional ini.

Hal terpenting disini adalah masukan-masukan yang konstruktif dengan berbagai perspektifnya apakah sumbangan-sumbangan produk pemikiran hukum dalam perspektif adat, agama atau barat sepanjang akan mendukung negara ke arah yang lebih baik maka itulah yang harus dikedepankan. Sekaligus disini bukan saatnya lagi untuk memonopoli kalim-klaim yang bersifat diskriminatif seperti menganggap hukum agama atau Hukum Islam sebagai hukum yang tidak ada hubungannya dengan laju peradaban modern atau hukum warisan kolonial.

Dalam kaitannya dengan topik perbincangan mengenai pendidikan hukum terutama dalam konteks semangat perkembangan dan gerakan pembenahan hukum nasional, maka kiranya asas hukum yang harus ditabuh sekuat dan seharmonis mungkin adalah: *“Lex plus laudatur quando ratione probatur”* (Hukum akan dihargai bila didukung oleh dasar yang masuk akal).

Hanya dengan sistem pendidikan hukum yang masuk akal pula yang akan membuat siapa saja siap bersikap objektif terhadap hukum manapun. Pendidikan atau doktrinasi hukum yang tidak sehat, tidak wajar, dan tidak masuk akal yang akan membuat hukum tidak akan pernah sehat. Bukankah dalam al-Qur'an juga sudah diingatkan untuk senantiasa mengikuti common sense dan jangan mengikuti orang-orang bodoh (Al-A'raf ayat 199).

Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Barat atau hukum mana saja yang belum pernah didaftarkan di tanah air ini, selama bermanfaat dan mendukung sehatnya kehidupan bangsa ini maka harus diterima sebagai hukum nasional kita. Dan demikian pula sebaliknya. Agar setiap hukum yang ada dapat memberikan sumbangan terbaiknya dan bisa ke arah sana, hanya satu yang dapat menentukannya, pendidikannya termasuk Fakultas Syari'ah.

Akhirnya kita mau atau tidak, kita setuju atau tidak dengan terpaksa kita harus bersiap dan mempersiapkan IAIN secara umum dan fakultas Syari'ah secara khusus dalam menghadapi perubahan menjadi universitas. Mengingat beragamnya kondisi internal yang kita miliki di daerah ini dan mencermati luas dan beragamnya situasi lingkungan yang meliputinya, mutlak diperlukan adanya otonomisasi dan

diversifikasi studi hukum Islam, hingga lebih relevan dengan kondisi obyektif masa kini dan proyeksi masa depan masing-masing. Yang barangkali perlu dikembangkan adalah jaringan antara berbagai pusat studi dan berbagai lembaga sejenis, terkait dan pendukung lainnya yang ada.

Semua ini menuntut adanya suatu perencanaan yang terarah dan upaya konkrit yang lebih komprehensif dan berkesinambungan untuk memperbaiki struktur dan meningkatkan kultur. Dari segi struktur patut dilakukan suatu kajian ulang hingga bisa menawarkan organisasi yang lebih fisibel bagi tatanan kejurusan, program studi, kurikulum serta variable proses dan piranti pendukung lainnya.

Status Fakultas dan kedudukan alumni Syari'ah dalam konstelasi institusi pendidikan tinggi hukum di negeri ini harus ditingkatkan. Seleksi dan promosi tenaga pengajar harus lebih didasarkan atas meritokrasi dan profesi. Perpustakaan harus menjadi prioritas untuk dilengkapi.

Perbaikan apapun dari segi struktur tidak akan berhasil banyak, malah bisa menjadi bumerang, jika tidak dilandasi oleh perubahan kultur. Terbinanya sikap ilmiah yang mantap serta budaya akademis yang baik di kalangan sivitas akademika menjadi mutlak diperlukan. Pandangan bahwa tugas seorang dosen hanya ketika bertatap muka di kelas, tanpa mengindahkan dan mengarahkan aktivitas akademis berstruktur dan kegiatan ilmiah mandiri, sebagaimana masih umum dipraktikkan selama ini, harus segera diubah. Gabungan dari perbaikan struktur dan cultural inilah yang akan mengantarkan studi Hukum Islam di IAIN khususnya dan perguruan tinggi umumnya yang akan membawa ke masa depan yang lebih cerah dan peran yang lebih

aktif-konstruktif bukan saja bagi kemaslahatan umat Islam tetapi demi kesejahteraan bangsa Indonesia seluruhnya, bahkan bagi kemajuan kemanusiaan.

Dengan demikian masih terlalu jauh dan banyak persoalan yang menghadang dihadapan kita untuk membawa IAIN Alauddin menjadi universitas dan menempatkan fakultas Syari'ah sebagai salah satu fakultas dengan bidang kajian keilmuan adalah ilmu hukum secara luas (umum dan khusus).

Hanya dengan memperbaiki dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang menghadang tersebut niscaya kita dapat mewujudkan harapan tersebut. Yang pasti kita setuju atau tidak, kita mau terima atau tidak ke depan IAIN Alauddin haruslah menjadi universitas termasuk fakultas Syari'ah menjadi fakultas umum. Kondisi lingkungan dan pengaruh globalisasi memaksa kita untuk menerima kenyataan tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita memulai sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan diri untuk menjadi universtas?

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai hasil akhir dari penelitian ini yang merupakan jawaban atas permasalahan sebagaimana ditetapkan pada bagian pendahuluan penelitian, berikut ini akan dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Kita mau atau tidak, kita setuju atau tidak dengan terpaksa kita harus bersiap dan mempersiapkan IAIN secara umum dan fakultas Syari'ah secara khusus dalam menghadapi perubahan menjadi universitas. Semua ini menuntut adanya suatu perencanaan yang terarah dan upaya konkrit yang lebih komprehensif dan berkesinambungan untuk memperbaiki struktur dan meningkatkan kultur. Dari segi struktur patut dilakukan suatu kajian ulang hingga bisa menawarkan organisasi yang lebih fisibel bagi tatanan kejurusan, program studi, kurikulum serta variable proses dan piranti pendukung lainnya.

Status Fakultas dan kedudukan alumni Syari'ah dalam konstelasi institusi pendidikan tinggi hukum di negeri ini harus ditingkatkan. Seleksi dan promosi tenaga pengajar harus lebih didasarkan atas meritokrasi dan profesi. Perpustakaan harus menjadi prioritas untuk dilengkapi.

Perbaikan apapun dari segi struktur tidak akan berhasil banyak, malah bisa menjadi bumerang, jika tidak dilandasi oleh perubahan kultur. Terbinanya sikap ilmiah yang mantap serta budaya akademis yang baik di kalangan sivitas akademika menjadi mutlak diperlukan. Pandangan bahwa tugas seorang dosen hanya ketika bertatap muka di kelas, tanpa mengindahkan dan mengarahkan aktivitas akademis berstruktur dan kegiatan ilmiah mandiri, sebagaimana masih umum dipraktikkan selama ini, harus segera diubah. Gabungan dari perbaikan struktur dan kultural inilah yang akan mengantarkan *studi Hukum Islam di IAIN* khususnya dan perguruan tinggi umumnya yang akan membawa ke masa depan yang lebih cerah dan peran yang lebih aktif-konstruktif bukan saja bagi kemaslahatan umat Islam tetapi demi kesejahteraan bangsa Indonesia seluruhnya, bahkan bagi kemajuan kemanusiaan.

Dengan demikian masih terlalu jauh dan banyak persoalan yang menghadang dihadapan kita untuk membawa IAIN Alauddin menjadi universitas dan menempatkan fakultas Syari'ah sebagai salah satu fakultas dengan bidang kajian keilmuan adalah ilmu hukum secara luas (umum dan khusus).

Hanya dengan memperbaiki dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang menghadang tersebut niscaya kita dapat mewujudkan harapan tersebut. Yang pasti kita setuju atau tidak, kita mau terima atau tidak ke depan IAIN Alauddin haruslah menjadi universitas termasuk fakultas Syari'ah menjadi fakultas umum. Kondisi lingkungan dan pengaruh globalisasi memaksa kita untuk menerima kenyataan tersebut dengan tidak lupa memulai sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan diri untuk menjadi universtas.

5.2. Saran

Perlu segera dibicarakan secara serius kemungkinan IAIN Alauddin Makassar menjadi universitas termasuk menjadikan Fakultas Syari'ah sebagai fakultas umum (hukum). Pembicaraan tersebut tidak hanya dalam bentuk wacana seperti yang hingga kini berkembang akan tetapi perlu dilakukan pembicaraan melalui forum-forum ilmiah serta penelitian-penelitian yang lebih komprehensif.

Pembicaraan tersebut tidak hanya menyangkut aspek-aspek yang terdapat dalam infra struktur akan tetapi juga dalam supra struktur IAIN Alauddin secara umum dan Fakultas Syari'ah secara khusus. Perlu dikaji secara mendalam tentang keseriusan civitas akademika Fakultas Syari'ah serta dukung pemerintah (Departemen Agama). Oleh karena kita setuju atau tidak kita mau atau tidak ke depan Fakultas Syari'ah harus dapat mengikuti perubahan IAIN Alauddin Makassar menjadi perguruan tinggi umum (universitas).

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Fielsted, William J. (ed), *Qualitative methodology*, (Chicago: Markham, 1970).
- Friedman, Lawrence M, *The Legal System, A Social Science Perspektif*, (New York: Russle Sage Fondation, 1975).
- Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Cet. I; (Bandung: Mizan, 1997).
- Moleong, Lexi J. *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remadja Rosdakarya, 1998)
- Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987).
- Suparlan, Parsudi, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: Kajian Wanita Universitas Indonesia, 1994).
- Poerwandari, E. Kristi. *Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fak. Psikologi Universitas Indonesia, 1998).

**DEPARTEMEN AGAMA R.I.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ALAUDDIN MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 864928-864931 Makassar

SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN ALAUDDIN

Nomor: 53 Tahun 2003

tentang

**PENELITI/KETUA PENELITI, JUDUL PENELITIAN DAN KONSULTAN PENELITI
BIAYA DIKS IAIN ALAUDDIN TAHUN 2003**

REKTOR IAIN ALAUDDIN

Setelah

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam tahun anggaran 2003, dosen IAIN Alauddin Makassar akan melaksanakan penelitian.
 2. Bahwa untuk melaksanakan penelitian tersebut dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
 3. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan penelitian.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No.2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 232 tahun 1991 dan No.289 tentang wewenang menandatangani Surat Keputusan.
 4. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 389 tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Alauddin.
 5. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 403 tentang Statuta IAIN Alauddin
 6. Surat Dirjen Binbaga Islam Departemenn Agama R.I. Nomor E/TL.00/AZ/1878 A/1998 tanggal 29 Mei tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Penelitian

Meningat pula : Hasil pemeriksaan Tim Penyeleksi Proposal penelitian IAIN Alauddin tanggal 8 April 2003

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR IAIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENELITI/KETUA PENELITI, JUDUL PENELITIAN DAN KONSULTAN PENELITI BIAYA DIKS IAIN ALAUDDIN TAHUN 2003
- Pertama :** Mengangkat mereka yang tersebut namanya di dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai peneliti/ketua peneliti dan konsultan.
- Kedua :** Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) IAIN Alauddin tahun anggaran 2003
- Ketiga :** Waktu pelaksanaan penelitian selama 7 (tujuh) bulan mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 2 Desember 2003.

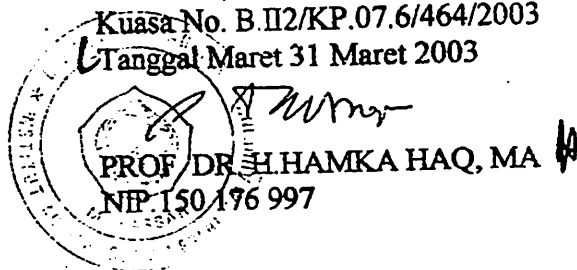
- empat : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- lima : Surat Keputusan ini berlaku sesuai tanggal penemuannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dipertahankan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 17 April 2003

REKTOR,

Kuasa No. B.112/KP.07.6/464/2003

Tanggal Maret 31 Maret 2003



Tembusan:

Disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Departemen Agama R.I. di Jakarta.
2. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. di Jakarta.
3. Ditbinperta Islam Departemen Agama R.I. di Jakarta
4. Kepala KPKN II Makassar.
5. Para Dekan dalam lingkungan IAIN Alauddin.
6. Bendaharawan DIKS IAIN Alauddin Makassar.
7. Dosen peneliti untuk diketahui

LAMPIRAN: PROPOSAL PENELITIAN DIKS TAHUN 2003

No	Peneliti Pangkat, Gol, NIP	Judul Proposal	Unit Kerja	Ket	Pembimbing
1	Dra. Andi Halimah, M. Pd/ Asisten Ahli IIIb /150 267 685	Strategi pembelajaran keterampilan membaca dan berbicara secara terpadu di SLTP Negeri I Sungguminasa Kab. Gowa	Tarbiyah	Mandiri	Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, MA
2	Drs. Dudung Abdullah, M. Ag Lektor kepala, IV/A 150 221 984	Prinsip komunikasi pembicaraan yang ideal menurut Al-qur'an (Suatu kajian Tafsir tematik terhadap pernyataan terkstual ayat Al-qur'an)	Syariah	Mandiri	
3	Drs. Mahmuddin, M. Ag Lektor, III/C 150 234 330	Pandangan Mahasiswa dan Dosen IAIN Alauddin Makassar ttg pembukaan jurusan baru	Dakwah	Mandiri	
4	Drs. M. Amin Bugman Asisten ahli, III/b 150 250 107 dkk	Tayangan televisi: Implikasinya pada perkembangan jiwa ke-agamaan anak	Tarbiyah	Kolektif	Prof. Dr. H.M. Radhi Al-Hafid
5	Dra: Nila sastrawaty, M. Si Asisten ahli, III/A 150 282 229	Studi korelasi peningkatan kualitas Dosen terhadap sistem dan intensifikasi dalam PBM Fak. Syariah IAIN Alauddin Makassar	Syariah	Mandiri	
					Dr. H.A. Qadir Gassing, MS

✓ 6	Drs. M. Ramli, M. Si Lektor kepala, IV/B 150 231 418	Penataan sistem manajemen dlm menunjang peningkatan kualitas alumni IAIN Alauddin Makassar	Ushuluddin	Mandiri	Dr.H.Moh. Natsir Mahmud, MA Dr. H. Bahaking Rama, MS Prof.Dr. H.A.Rahman Getteng
✓ 7	Dra. Aisya, M. Ag Lektor kepala, IV/B 150 232 981	Kontribusi wanita karier dlm pembinaan keluarga sejahtera pada pegawai dan dosen IAIN Alauddin Makassar	Ushuluddin	Mandiri	
✓ 8	Drs. Thamrin Tayeb, M. Si Asisten ahli, III/b 150 267 544	Analisis metode New Step- wise dlm pemilihan variabel pada model regresi	Tarbiyah	Mandiri	
✓ 9	Drs. Ibrahim, M. Pd Asisten ahli III/B 150 266 453	Pembelajaran struktur kalimat Bahasa Indonesia secara komunikatif di MTsN Makasar	Ushuluddin	Mandiri	
✓ 10	Drs. Suddin Bani, M. Ag Lektor, III/C 150 261 727	Penikiran pendidikan Al- Gazali sebagai yang termuat dlm Ihya' Ulum Al-Din	Tarbiyah	Mandiri	
✓ 11	Drs. M. Sabir U, M. Ag Lektor madya, III/D 150 259 627	Penikiran Ibnu Khaldun ttg pendidikan sebagai mana tertuang dalam kitab Muqaddimah	Tarbiyah	Mandiri	
✓ 12	Drs. M. Yahya, M. Ag Lektor, III/C 150 266 448	Metode Takhrij hadits Nabi (Suatu studi ttg tingkat pema- haman Mahasiswa Fak Tarbi- yah IAIN Alauddin Makassar	Tarbiyah	Mandiri	

13	Dra. Syahrudin Usman Lektor kepala, IV/B 150 231 415	Pengaruh pengetahuan agama, sikap beragama dan lingkungan keluarga terhadap perilaku beragama siswa MAN Pangkep	Tarbiyah	Mandiri	Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA
14	Dra. St. Nurjannah Yunus Tekeng, M. Ed, Asisten Ahli III/a 150 282 141	Studi ttg pendekatan belajar Mahasiswa IAIN Alauddin Makassar	Tarbiyah	Mandiri	
15	Marilang, SH, M.Hum Lektor Muda III/C 150261032	Analisis hukum fungsi penanaman modal asing terhadap optimalisasi otonomi daerah (Studi kasus di kota Makassar)	Syariah	Mandiri	
16	Dra. Hj. St. Nurwanita Z, M. Ag Lektor, III/D 150 024 773	Studi ttg sistem pembinaan kepemimpinan santriwati pada pesantren Modern IMMIM Putri Minasa Te'ne Kab. Pangkep	Tarbiyah	Mandiri	
17	Dra. St. Azisah, M.Ed Lektor, III/C 150 261 726	Strategi keluarga buruh dalam pemenuhan pendidikan anak (Analisis Jender)	Tarbiyah	Mandiri	
18	Dr. H.A. Qadir Gassing, H.T, M.S Lektor Kepala, IV/C 150 177 669	Perspektif Hukum Islam ttg konservasi sumber daya alam (Flora)	Syariah	Mandiri	Kolektif
19	Dr. Moh. Natsir Mahmud, MA IV-b 150 217 170 Staf Puslit	Pelaksanaan TUTOR dan TURI dalam proses perkuliahan di IAIN Alauddin Makassar	Puslit		

20	<p>✓ Drs. H. Sangkala Mahmud, M.Ag.IV/a Lektor Kepala. 150 210 443</p>	<p>Persepsi Mengenai pemberdayaan pegawai Negeri Sipil IAIN Alauddin Makassar</p>	Fak. Dakwah	Mandiri
21	<p>✓ Drs. H. Ambo Asse, M. Ag. IV/B Lektor kepala. 150 231 412</p>	<p>Peranan Pondok pesantren terhadap pembinaan dan pengembangan agama Islam (Suatu tinjauan kehidupan sosial keagamaan)</p>	Fak. Syariah	Mandiri
22	<p>✓ Dr. H. Bahaking Rama, Ms Lektor Kepala, IV/C 150 202 136</p>	<p>Opini Mahasiswa dan Dosen IAIN Alauddin Ttg pembukaan Jur- usan/program studi Baru</p>	Fak. Tarbiyah	Mandiri
23	<p>✓ Drs. H. Hasyim Aidid, MA Lektor kepala, IV/A 150 057 467 Drs. Arif Alim, M.Ag Drs. Hadi Dg Mapuna, M.Ag</p>	<p>Analisis faktor timbul nya konflik sara di Indonesia dan posisi ummat islam didalam nya</p>	Fak. Syariah	Kolektif
24	<p>✓ Drs.H.Musafir Pababbari,M.si Lektor ,III/D 150 227 581</p>	<p>Partisipasi politik elit agama di Sul-Sel (Studi kasus 6 partai politik peserta pemilu tahun1999)</p>	Fak. Ushuluddin	Mandiri

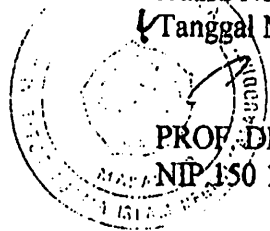
25	Drs. Tasmin Tangareng, M.Ag Lektor, III/D 150 260 231	Hadits-hadits tentang syafaat (Suatu anali- sis kritik dan pemak- naannya)	Fak. Ushuluddin	Mandiri
26	Ahkam Jayadi, SH, MH Lektor Kepala, IV/B 150 231 530	Pengembangan Fak. syari- ah IAIN Alauddin antara harapan dan kenyataan menuju universitas	Fak. Syariah	Mandiri
27	Dr. Muhamrnadiyah Amin, M.Ag.	Studi Kritis Hadis Dlm Wawasan Alqur'an Karya M. Quraisy Shihab	Fak. Syariah	Mandiri
28	Dra. Hamsiah Jafar, M.Hum III-c 150 258 478	Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Makassar (Suatu Analisis Kesalahan)	Fak. Tarbiyah	Mandiri

Makassar, 17 April 2003

REKTOR,

Kuasa No. B.II2/KP.07.6/464/2003

✓ Tanggal Maret 31 Maret 2003



PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA #
NIP. 150 176 997



DEPARTEMEN AGAMA RI.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN
UJUNG PANDANG

SERTIFIKAT

Nomor : **05** / PPTe / 1996

Dengan Rahmat Allah SWT, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin memberikan Sertifikat kepada :

N a m a : *Ahkam Jayadi, SH*
N I P : *150 231 530*
Tempat/Tgl. Lahir : *Sengkong, 24 Oktober 1961*
Jabatan/Unit Kerja : *Lektor Madhya/Fak. Syariah Ujungpandang*

setelah selesai mengikuti Pelatihan Peneliti Tenaga Edukatif IAIN Alauddin Tahun 1996 / 1997 di Ujung Pandang selama tiga bulan (Oktober s/d Desember 1996) sesuai dengan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Perguruan Tinggi Agama / IAIN Alauddin Nomor : P.25.04.019.16.1996 Tanggal 21 Januari 1996.

Semoga Ilmu dan Keterampilan yang diperoleh bermanfaat bagi pengembangan karier dan peningkatan pengabdian

Ujung Pandang 03 Januari 1997

Rektor,



DRS. H.M. SHALEH PUTUHENA
N.I.P. 150 015 460

